

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

5.1.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Pertanian Hortikultura Berbasis Sumberdaya Lokal

5.1.1.1 Penyiapan rancangan rencana pembangunan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelusuran dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja (Renja) DKP3 Tahun 2016, perencanaan pembangunan daerah di Kota Depok mengacu pada beberapa peraturan yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan hal tersebut maka penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal pun mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang sesuai dengan Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 25 Tahun 2004 dan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan politik, pendekatan *top-down*, pendekatan *bottom-up*, pendekatan partisipatif dan pendekatan teknokratik. Pendekatan politik mengacu kepada visi dan misi kepala daerah terpilih sebagaimana tercantum dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal demikian disampaikan oleh Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN "Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang punya visi misi itu hanya kepala daerah sehingga yang ada di dalam renstra OPD hanya memuat tujuan, sasaran dan seterusnya. Sehingga tidak ada lagi visi misi OPD." (wawancara tanggal 5 September 2017).

Pendekatan teknokratik dilakukan oleh Bappeda dan DKP3 Kota Depok dalam menyusun rancangan awal kerja yang akan dijadikan acuan dalam kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Pendekatan *top-down*, *bottom-up* dan partisipatif dapat dilihat dari kegiatan musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, lalu ke tingkat kecamatan hingga ke tingkat kota yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serta kegiatan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) yang dilaksanakan oleh setiap OPD. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN:

"Pendekatan yang dilakukan secara *top-down*, *bottom-up*, aspiratif yang (berasal) dari DPRD dan masyarakat, dan ada juga berdasarkan keahlian. Semuanya kita rangkum. Prosesnya ada yang melalui musrenbang, ada yang melalui renja OPD, ada juga yang (berasal) dari diskusi kita dengan tim yang dibentuk untuk membantu kita dalam proses perencanaan.

Diskusi dari hasil kajian, istilahnya perencanaan teknokratik” (wawancara tanggal 4 Agustus 2017)

Dari informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa mekanisme perencanaan pembangunan daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama*, melalui proses musrenbang dan forum renja OPD sebagai perencanaan *top-down*, *bottom-up*, dan partisipatif; dan yang *kedua*, melalui diskusi dengan tim yang dibentuk untuk membantu perencanaan, istilahnya perencanaan teknokratik.

Secara garis besar, penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal diawali dengan adanya penyusunan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai dasar dari perencanaan yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra). Hal ini sebagaimana telah diungkapkan oleh Kasubbag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP) DKP3 Kota Depok, LA “Peraturan yang dipakai dalam perencanaan yaitu berdasarkan tupoksi kita pakai Perwal tentang tupoksi OPD, Satuan Standar Harga, dan RPJMD juga” (wawancara tanggal 1 Agustus 2017).

Hal tersebut diperkuat lagi oleh pernyataan Kasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) DKP3 Kota Depok, HAF “Dasar perencanaan pembangunan pertanian Dinas mengacu pada RPJMD, Renstra OPD, peraturan terkait perencanaan.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017).

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi hirarkinya. Hal ini ditegaskan oleh Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN:

“RKPD itu merupakan dasar acuan penyusunan KUA, Kebijakan Umum Anggaran, jadi yang dianggarkan adalah semua yang ada di RKPD. RKPD adalah pelaksanaan tahunan dari RPJMD. Draft RKPD menjadi acuan

penyusunan Renja OPD. Karena tidak mungkin menunggu hingga RKPD selesai karena akan menghambat proses penyusunan lainnya.” (wawancara tanggal 5 September 2017)

Dari pernyataan informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa pada saat bersamaan dengan penyiapan rancangan rencana pembangunan di tingkat kota, maka masing-masing Dinas atau OPD menyiapkan rencana kerja (renja) yang berpedoman pada draf atau rancangan RKPD yang telah disiapkan.

Renstra OPD juga berperan penting dalam memandu dan mengarahkan tujuan pembangunan pertanian agar tidak terjadi penyimpangan selama pelaksanaan. Renstra OPD yang dijadikan sebagai panduan pembangunan pertanian merupakan Renstra DKP3 yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta target kinerja yang akan dicapai. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) DKP3 Kota Depok, HAF:

“Sejauh mana pentingnya renstra, renstra harus ada karena sebagai *guidance*, supaya tidak keluar dari arah kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan. Yang tertuang dalam renstra adalah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, target-target kinerja yang akan dicapai, sasaran dan target siapa saja, sasarannya adalah kelompok tani atau petani, dan bagaimana caranya menyejahterakan mereka.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017)

Dalam rangka pembangunan pertanian Kota Depok, DKP3 mengacu pada visi dan misi Kota Depok. Hal ini dinyatakan oleh Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN:

“... pada dasarnya OPD itu melaksanakan visi misi kepala daerah. OPD tidak dibebani lagi dengan visi dan misi. Karena sebetulnya yang harus dibalik dalam proses perencanaan adalah OPD itu harus berpikir apa yang bisa saya kerjakan untuk menunjang visi tersebut, apa yang harus saya selesaikan untuk menyelesaikan misi tersebut. OPD harus menjabarkan visi misi tersebut. Dan penjabaran itu disesuaikan dengan tupoksi dari masing-masing OPD. Ada OPD yang sifatnya penunjang, ada OPD yang sifatnya sebagai utama. Kayak misalnya ada salah satu visi misalnya Nyaman, turunan visinya adalah infrastruktur kota yang ramah keluarga misalnya. Di situ kan ada beberapa OPD yang memiliki kontribusi untuk

mencapai misi tersebut. Kayak Rumkin, PUPR, dan OPD-OPD lain baik yang sifatnya sebagai penunjang maupun yang utama. Bagaimana, apa yang mesti mereka masukkan ke dalam renstra mereka sehingga visi misi tersebut dapat tercapai. Karena pemerintahan itu harus efektif efisien. Kalau OPD punya visi misi sendiri khawatir tidak efektif dan tidak efisien karena mereka hanya buat program yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Akhirnya OPD itu hanya sibuk dengan keinginannya sendiri sehingga lupa dengan kewajiban utamanya.” (wawancara tanggal 5 September 2017)

Dari penjelasan informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa visi dan misi seluruh OPD mengacu pada visi dan misi kepala daerah, dalam hal ini telah menjadi visi dan misi Kota Depok. Sehingga dalam renstra OPD hanya memuat tujuan, sasaran, kegiatan yang terkait dengan visi dan misi tersebut. Selain itu cara berpikir seluruh OPD yang harus dibangun adalah bagaimana menemukan cara secara efektif dan efisien untuk menunjang visi dan misi tersebut dalam bentuk kegiatan. Bilamana tiap OPD memiliki visi dan misi sendiri maka tentunya akan menghabiskan waktu dan energi untuk mencapainya sehingga tujuan utama pembangunan yang dirumuskan oleh kepala daerah tidak akan tercapai. Dengan demikian pemerintahan tidak akan efektif dan tidak efisien.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan yang disampaikan oleh Kasubbid Perencanaan Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, JUM, bahwa,

“Kalau penjabaran di OPD itu nanti dia mengarah ke penjabaran visi misi itu sesuai dengan tusi, ada di RPJMD itu kan jelas, kita jelaskan ada tujuan kota, kemudian ada arah dan kebijakan kota, mulai dari visi misi dan sebagainya, nah dari sana nanti OPD itu adalah menjabarkan visi misi, iya kan, sesuai dengan tugasnya masing-masing, tugas dan fungsi ya, tupoksi ya, tupoksinya OPD, disesuaikan juga dengan target dan indikator kota, ga boleh keluar dari dua poin itu, poin pertamanya tetap di RPJMD.” (wawancara tanggal 11 September 2017)

Di Kota Depok, di awal tahun di bulan pertama sebelum memulai penyusunan rencana pembangunan diadakan kegiatan sosialisasi perencanaan pembangunan tahun berjalan. Hal demikian disampaikan oleh Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN bahwa “Di Kota Depok sebelum

musrenbang ada sosialisasi perencanaan pembangunan tahun berjalan yang bertujuan supaya di perencanaan selanjutnya tidak terjadi usulan kembali pada saat proses musrenbang.” (wawancara tanggal 4 Agustus 2017). Secara lebih rinci beliau menjelaskan mengenai kegiatan sosialisasi tersebut,

“Sosialisasi itu hanya untuk menginformasikan bahwa tahun ini kita punya kegiatan ini lho. Yang dirumuskan tahun ini nanti disosialisasikan lagi tahun depan. Pada saat tahun pertama, kita sosialisasi T1, pada tahun depan kita sosialisasi T2, tapi pada saat T1 kita sudah merumuskan T2. Sosialisasi itu kegiatannya khusus untuk sosialisasi, kegiatannya di awal tahun. (bukan di musrenbang). Dilaksanakannya di tingkat kota. Tempatnya tentative. Kegiatannya dalam bentuk sosialisasi saja. Yang melaksanakan adalah Bappeda. Pesertanya *stakeholders*. OPD termasuk masyarakat diwakili oleh LPM biasanya. Itu hasil perencanaan tahun sebelumnya.” (wawancara tanggal 1 November 2017)

Dengan demikian kegiatan sosialisasi perencanaan pembangunan tahun berjalan memiliki dua fungsi yaitu pertama, sebagai “ruang *display*” seluruh program atau kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berjalan, dan kedua, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengukur kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun berikutnya.

Setelah kegiatan sosialisasi dan sebelum masuk ke pelaksanaan kegiatan musrenbang, Bappeda Kota Depok sebagai fasilitator kegiatan menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menentukan isu strategis di tahun berikutnya. Hal ini berdasarkan penjelasan Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN bahwa,

“...setelah sosialisasi, proses ini kan panjang, sebelum masuk ke musrenbang kita bikin FGD untuk menentukan isu strategis tadi. Masalah kota yang harus diselesaikan di tahun berjalan. Nah hasil ini, ada yang memang sifatnya *top-down* yang kita tetapkan dalam artian ini masalah yang harus diselesaikan. OPD menyelesaikan ini dengan cara apa. Kayak misalnya macet, kan ada dishub. Dishub untuk menyelesaikan masalah macet, ngapain. PUPR ngapain, gitu loh. Mereka masukkan program yang sebenarnya sudah ada di RPJMD tapi dikuatkan menjadi program prioritas mereka. Nanti hasil dari FGD ini dibawa ke musrenbang.” (wawancara tanggal 1 November 2017)

Berdasarkan RPJMD Kota Depok Tahun 2016-2021 yang dimaksud isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang. Alih fungsi lahan tidak masuk dalam isu-isu strategis sebagaimana diungkap oleh Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN:

“... Engga, jarang ada, pernah ada tapi sekarang kayaknya udah engga ada. Alih fungsi lahan ya, sekarang engga, tahun ... di RPJMD kita engga ada malah engga masuk alih fungsi lahan. Engga masuk tu maksudnya.. isu strategis ya, masuk di isu karena dimanapun FGDnya jarang ada yang menyampaikan alih fungsi lahan, paling lebih banyak konservasi, ruang terbuka hijau. Jadi alih fungsi lahannya itu karena... larinya ke RTH, ruang terbuka hijau kemudian ke kawasan konservasi. Jarang alih fungsi lahan untuk pertanian.” (wawancara tanggal 2 November 2017)

Meskipun tidak masuk dalam isu-isu strategis namun bukan berarti alih fungsi lahan tidak diperhatikan sama sekali dalam pembangunan daerah mengingat Kota Depok mengalami pertumbuhan populasi penduduk yang demikian cepat. Kegiatan FGD isu strategis ini merupakan langkah pertama dalam penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal yang bersifat teknokratik, menyeluruh, dan terukur. Hal tersebut sebagaimana paparan Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN, bahwa

“...FGD itu ada yang memang, ketika bicara isu strategis mengundang para pakar, yang kita anggap pakar di bidangnya walaupun itu kita anggap sebagai *stakeholders*, tapi *stakeholders* dari akademisi, dari ASN sendiri, dari Dinas, itu termasuk langkah pertama, teknokratik, iya kan. Nah ini yang menjadi dasar ketika kita mau masuk ke langkah berikutnya.yaitu langkah melalui musrenbang.” (wawancara tanggal 2 November 2017)

Sambung beliau, “FGD itu pelengkap musrenbang karena di dalam dokumen perencanaan tidak diwajibkan FGD. Cuma kita melakukan FGD sebagai penguatan terhadap perencanaan yang akan kita rencanakan ke depan.” (wawancara tanggal 1 November 2017). Artinya dalam penyusunan rencana pembangunan Pemerintah Kota Depok memberi ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengangkat isu-isu kota yang layak mendapat prioritas dan harus diselesaikan. Berdasarkan penelusuran dokumen, peneliti memperoleh informasi bahwa setelah kegiatan FGD isu-isu strategis, Bappeda Kota Depok mengadakan FGD RKPD yang dimaksudkan untuk mengevaluasi capaian kinerja program yang telah dilaksanakan oleh OPD dan mempertajam fokus program dan kegiatan yang disinergikan dengan isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok 2016-2021. Setelah FGD, Bappeda Kota Depok mengadakan konsultasi publik sebagai media untuk mempertajam program maupun isu prioritas yang telah digagas sebelumnya. Bedanya dengan FGD, pelaksanaan konsultasi publik melibatkan masyarakat untuk menerima masukan seputar isu-isu strategis hasil FGD.

5.1.1.2 Pelaksanaan musrenbang

Langkah berikutnya dalam penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal adalah pelaksanaan kegiatan musrenbang. Mengenai urutan pelaksanaan kegiatan musrenbang diterangkan oleh Kasubbag Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP) DKP3 Kota Depok, LA “Urutan musrenbang mulai dari kelurahan, kecamatan, OPD lalu tingkat kota. Setelah itu diolah lagi oleh tim.” (wawancara tanggal 1 Agustus 2017).

Tahapan perencanaan dengan pendekatan *top-down*, *bottom-up* dan partisipatif merupakan upaya pemerintah dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Penjaringan aspirasi dari masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan musrenbang dijabarkan secara detail oleh Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN:

“Musrenbang dimulai dari RT, lalu RW meskipun istilahnya bukan musrenbang tapi musyawarah internal mereka, meskipun hanya inisiatif dari beberapa kelurahan. Dari sana kemudian masuk ke musrenbang kelurahan, lalu masuk ke musrenbang kecamatan, lalu ke musrenbang kota. Nah diantara musrenbang itu ada yang namanya Renja OPD. Itu untuk penyusunan rencana kerja OPD. Yang masuk dalam renja OPD adalah usulan dari musrenbang dan usulan kebutuhan prioritas mereka sendiri. Dan itu nanti akan masuk dalam dokumen yang namanya RKPD yang akan diinput dalam RKPD online. Itu yang menjadi dasar kita dalam proses penyusunan perencanaan termasuk dalam proses penganggaran.” (wawancara tanggal 4 Agustus 2017)

Lebih lanjut beliau menerangkan bahwa, “Khusus untuk RT dan RW tidak kita jadwalkan karena itu sifatnya informal”. (wawancara tanggal 5 September 2017). Mengenai kepesertaan dalam musrenbang beliau menerangkan, “Yang diundang dalam proses musrenbang adalah siapa saja yang dianggap mewakili mulai dari unsur anak-anaknya, pemuda, orangtua, tokoh masyarakat, unsur masyarakat yang terikat secara struktur seperti LPM, RW atau RT.” (wawancara tanggal 4 Agustus 2017).

Dari penjelasan informan tersebut dapat diketahui bahwa urutan perencanaan pembangunan daerah dilakukan melalui musrenbang secara berjenjang dimulai dari tingkat kelurahan, lalu tingkat kecamatan, dan terakhir tingkat kota, serta Forum Renja OPD untuk penyusunan rencana kerja OPD. Usulan yang masuk ke dalam Forum Renja OPD adalah usulan dari hasil musrenbang dan usulan dari kebutuhan proritas internal OPD itu sendiri. Setelah itu hasilnya akan diinput dalam dokumen perencanaan berupa Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) dan masuk ke dalam RKPD online. Adapun musyawarah di tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) bukan sebagai musrenbang karena sifatnya informal, namun sebagai diskusi internal masyarakat di lapisan paling bawah yang akan diusulkan ke tingkat di atasnya dan menjadi bagian penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Yang dapat menjadi peserta dalam proses musrenbang yaitu perwakilan masyarakat yang berasal dari unsur pemuda, orangtua, tokoh masyarakat, dan unsur masyarakat yang terikat secara struktur.

Mengenai jadwal pelaksanaan musrenbang Kota Depok, Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN menyatakan “Penetapan RKPD itu kan di per tanggal 31 Mei, sehingga proses musrenbang harus sudah selesai sebelum tanggal tersebut. Proses pembahasan musrenbang dilakukan bulan Januari, Februari, Maret dan April”. (wawancara tanggal 5 September 2017)

Berdasarkan dokumen yang diperoleh peneliti bahwa Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Adapun jadwal pelaksanaan Musrenbang Tahun 2017 di Kota Depok dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1 Jadwal Pelaksanaan Musrenbang Kota Depok Tahun 2017

No	Rangkaian Kegiatan Musrenbang 2017	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab
1	Musrenbang Kelurahan	Januari 2017	Lurah
2	Musrenbang Kecamatan	Januari-Februari 2017	Camat
3	Forum Renja OPD	Februari-Maret 2017	Tim Penyelenggara dan Kepala OPD
4	Musrenbang Kota	Maret 2017	Bappeda

Sumber: Bappeda Kota Depok

Lebih lanjut dapat dijelaskan mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan secara berjenjang yaitu:

1. Musrenbang Kelurahan

Berdasarkan dokumen Buku Panduan Pelaksanaan Musrenbang 2017 yang diperoleh peneliti, Musrenbang RKPD Kelurahan atau Musrenbang Kelurahan memiliki pengertian sebagai forum musyawarah antar para pemangku kepentingan di Kelurahan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan masing-masing Rukun Warga (RW) yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan.

Adapun tujuan diselenggarakannya musrenbang kelurahan yaitu (1) Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat RW yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan yang bersangkutan; (2) Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan usulan Kelurahan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan tingkat RW; dan (3) Menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kelurahan dalam bentuk Berita Acara Hasil Musrenbang Kelurahan.

Tahapan pelaksanaan musrenbang kelurahan yaitu (1) Masyarakat di tingkat RW melaksanakan musyawarah untuk menentukan kegiatan prioritas yang akan usulkan ke tingkat Musrenbang Kelurahan; (2) Kelurahan mengkompilasi hasil musyawarah di tingkat RW; (3) Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang Kelurahan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta; (4) Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Kecamatan melalui surat pemberitahuan; (5) Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD di Kelurahan yang dilampiri dengan bahan musrenbang; (6) Pembahasan pada tahap Musrenbang Kelurahan difokuskan pada kegiatan prioritas; dan (7) Kegiatan prioritas hasil

Musrenbang Kelurahan selanjutnya akan diklarifikasi, ditajamkan dan diselaraskan pada Musrenbang RKPD di kecamatan.

Adapun kriteria umum untuk usulan kegiatan prioritas kelurahan yaitu (1) Merupakan kegiatan untuk kepentingan masyarakat tingkat Kelurahan; (2) Memiliki tingkat urgensi tinggi dan memberikan manfaat kepada masyarakat Kelurahan; (3) Mendukung pengembangan potensi lokal/kewilayahan; (4) Mengatasi permasalahan di tingkat Kelurahan pada bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan dan infrastruktur; (5) Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan kota (target RPJMD); dan (6) Mempedomani petunjuk teknis atau surat edaran pelaksanaan prioritas pembangunan Kelurahan tahun 2018.

Musrenbang kelurahan di Kota Depok diselenggarakan pada bulan Januari 2017 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kelurahan mencakup (1) Peserta yaitu para ketua RT/RW, tokoh masyarakat, kelompok PKK, Badan Kesewadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), perwakilan anak, perwakilan lansia, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat Kelurahan; (2) Narasumber dari camat, Lurah, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan perwakilan instansi vertikal (Babinsa dan polisi kamtibmas); dan (3) Fasilitator yaitu tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

2. Musrenbang Kecamatan

Berdasarkan dokumen Buku Panduan Pelaksanaan Musrenbang 2017 yang diperoleh peneliti, Musrenbang RKPD Kecamatan atau Musrenbang

Kecamatan merupakan forum tertinggi di tingkat kecamatan untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah Kecamatan.

Adapun tujuan diselenggarakannya musrenbang kecamatan adalah untuk penajaman, penyesuaian, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan yang mencakup (1) Membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan Kelurahan yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan; (2) Membahas dan menyepakati kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan di wilayah Kecamatan yang bersangkutan; dan (3) Menyepakati pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi OPD.

Tahapan pelaksanaan musrenbang kecamatan yaitu (1) Kompilasi hasil musrenbang Kelurahan menurut urutan prioritas yang disepakati di musrenbang Kelurahan; (2) Penyiapan daftar berbagai unsur yang akan dilibatkan dalam musrenbang Kecamatan yaitu narasumber, fasilitator, dan peserta; (3) Pemberitahuan jadwal dan tempat pelaksanaan musrenbang kepada Bappeda Kota Depok melalui surat pemberitahuan; (4) Penyampaian undangan kepada peserta musrenbang RKPD di Kecamatan, yang dilampiri dengan bahan atau agenda musrenbang; dan (5) Pembahasan pada tahap Musrenbang Kecamatan adalah untuk menajamkan, mengklarifikasi dan menyesuaikan usulan kegiatan prioritas Kelurahan hasil Musrenbang Kelurahan serta membahas usulan kegiatan yang akan disampaikan dalam forum OPD.

Musrenbang kecamatan di Kota Depok diselenggarakan pada bulan Januari-Februari 2017 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun unsur-unsur yang dilibatkan dalam musrenbang kecamatan yaitu (1) Peserta yaitu para lurah, delegasi Kelurahan, LPM Kelurahan, pimpinan dan anggota DPRD kota asal daerah pemilihan Kecamatan bersangkutan, perwakilan OPD, tokoh masyarakat, perwakilan anak, perwakilan lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok masyarakat marginal dan pemangku kepentingan tingkat Kecamatan; (2) Narasumber dari perwakilan DPRD kota asal daerah pemilihan Kecamatan, Bappeda, camat, perwakilan OPD, dan FKA-LPM Kecamatan; dan (3) Fasilitator yaitu tenaga terlatih atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan dan proses pengambilan keputusan dalam kelompok diskusi.

3. Forum Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)

Forum Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Forum Renja OPD mempunyai pengertian sebagai wadah bersama antar pelaku pembangunan atau wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan OPD sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Forum Renja OPD membahas rancangan Renja OPD, dengan menggunakan prioritas program dan kegiatan yang dihasilkan dari musrenbang RKPD di Kecamatan, sebagai bahan untuk menyempurnakan rancangan Renja OPD, yang difasilitasi oleh OPD terkait. Forum Renja OPD dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi, efisiensi dan efektifitas sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian dapat diselenggarakan oleh masing-masing OPD atau dilaksanakan secara gabungan beberapa OPD dibawah koordinasi Bappeda.



Sumber: DKP3 Kota Depok

Gambar 5.1 Kegiatan Forum Renja OPD DKP3 Kota Depok Tahun 2017

Forum Renja OPD di Kota Depok diselenggarakan pada bulan Februari-Maret 2017 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Adapun Forum OPD DKP3 Kota Depok diselenggarakan pada tanggal 16 Februari 2017. Tujuan diselenggarakannya Forum OPD yaitu (1) Menyelaraskan program dan kegiatan OPD dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD di Kecamatan; (2) Mempertajam indikator serta target program dan kegiatan OPD sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta mengacu pada visi dan misi Walikota; (3) Menyelaraskan program dan kegiatan antar OPD dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah; dan (4) Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

Unsur-unsur yang terlibat dalam Forum Renja OPD mencakup (1) Peserta, yaitu perwakilan musrenbang Kecamatan, unsur teknis OPD terkait dan yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan, serta Bappeda; (2) Narasumber yang berasal dari Bappeda, OPD, dan DPRD; dan (3) Fasilitator yaitu tenaga terlatih

atau berpengalaman yang memiliki persyaratan kompetensi dan kemampuan memandu pembahasan/diskusi dan proses pengambilan keputusan dalam sidang kelompok. Fasilitator membantu kelancaran proses pembahasan dan pengambilan keputusan untuk menyepakati setiap materi yang dibahas dalam setiap sidang kelompok forum Renja-OPD.

Mengenai Forum Renja OPD Kasubbag Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP) DKP3 Kota Depok, LA mengatakan bahwa,

“Pendekatan yang dilakukan berupa pendekatan aspirasi di FOPD dengan mengundang kelompok tani, peternak dan pembudidaya ikan dan wanita tani (KWT) untuk menyampaikan apa saja yang mereka butuhkan dan apa saja yang mereka harapkan, lalu dari hasil FOPD kita ajukan ke musrenbang kota. Nanti di musrenbang kota akan dikelola oleh Bappeda mana saja yang masuk dan dilaksanakan.” (wawancara tanggal 1 Agustus 2017)

Pernyataan tersebut diperkuat oleh penjelasan Kabid Ketahanan Pangan dan Hortikultura (KPH) DKP3 Kota Depok, HK “Forum OPD diawali dari musrenbang tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, lalu tingkat kota. Sebelum tingkat kota, kita kan ada forum OPD dulu. Itu idealnya. ... selama ini usulan lebih banyak kepada infrastruktur.” (wawancara tanggal 30 Agustus 2017).

Dari penjelasan informan tersebut dapat dijelaskan bahwa kegiatan di Forum Renja OPD berupa pemaparan, *sharing* pendapat dan diskusi antar pemangku kepentingan yang terkait dengan bidang pertanian, peternakan dan perikanan. Hasil usulan dari Forum OPD akan dikembangkan di musrenbang tingkat kota, setelah itu diserahkan ke Bappeda untuk dikelola berdasarkan prioritas. Para peserta yang diundang di Forum OPD DKP3 Kota Depok yaitu kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan dan kelompok wanita tani (KWT). Usulan yang diajukan di Forum OPD DKP3 Kota Depok masih didominasi masalah infrastruktur bila dibandingkan pertanian itu sendiri.

4. Musrenbang Kota

Berdasarkan dokumen Buku Panduan Pelaksanaan Musrenbang 2017 yang diperoleh peneliti, Musrenbang RKPD tingkat Kota Tahun 2017 merupakan forum antar pemangku kepentingan untuk menyelaraskan, mengklarifikasi, mempertajam dan menyepakati prioritas pembangunan dan program/kegiatan Daerah yang telah diusulkan melalui Musrenbang RKPD di kelurahan, kecamatan dan forum organisasi perangkat daerah. Hasil kesepakatan Musrenbang tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018. Selanjutnya RKPD menjadi pedoman dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok Tahun 2018.

Maksud dan tujuan pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat Kota adalah untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD kota yang mencakup:

1. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan kota dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan provinsi;
2. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD Kota serta pada saat Forum OPD;
3. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
4. Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap sinergi dengan RKP dan RKPD Provinsi.



Sumber: Bappeda Kota Depok

Gambar 5.2 Kegiatan Musrenbang Kota Depok Tahun 2017

Musrenbang RKPd tingkat Kota di Kota Depok diselenggarakan pada tanggal 15-16 Maret 2017 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Peserta Musrenbang RKPd tingkat Kota mencakup unsur Muspida Kota Depok, seluruh OPD Kota Depok, seluruh Camat dan Lurah se-Kota Depok, unsur Bappeda Provinsi Jawa Barat, unsur Bappeda dari Pemerintah Daerah yang berbatasan dengan Kota Depok, Institusi Perguruan Tinggi, Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi, utusan Forum OPD dan Musrenbang Kecamatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan LPM, Asosiasi dan unsur Lembaga Vertikal Kota Depok.

Dalam kegiatan musrenbang, petani atau kelompok telah dilibatkan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Hal ini menandakan keberadaan mereka telah diakui oleh pemerintah dan keaktifan mereka dalam musrenbang turut menentukan perencanaan pembangunan pertanian ke depan. Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Maju Bersama Kecamatan Cimanggis, HG:

“(Saya) sering diundang ke musrenbang tiap tahun, kelurahan, kecamatan, OPD dan kota. Usulannya tiap tahun paling cuma sarana produksi. Karena

prioritasnya cuma itu, berbeda jenis barangnya aja. Kalau infrastruktur kan udah ada bidangnya masing-masing misalnya LPM. Yang terealisasi sih biasanya dari OPD (dinas), ga banyak, ga mungkin tercover semua. Kadang apa yang kita minta lima, tapi yang datang dua, kira-kira gitu.” (wawancara tanggal 30 Agustus 2017)

Pernyataan tersebut senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Kalilicin, Kecamatan Pancoranmas, NY:

“Kalau musrenbang mah sering diundang. Bahkan saya usulin di tingkat kecamatan bahwa tolong perwakilan KTNA atau kelompok tani di tiap kelurahan wajib hukumnya, wajib hukumnya datang ke musrenbang, di undang kan? Selama ini kan gini kelompok tani atau KTNA saya tanya, kenapa ga datang ke musrenbang? (jawabnya) kaga diundang pak. Ini akar masalahnya di sini. Kalau saya, diundang ga diundang, (pasti) datang kalau saya tau ya. Tapi tahun yang ini tahun yang kemaren buat tahun 2018 saya ga diundang, (saya) kesal ama lurah ceritanya, ama LPM, (lalu) saya diundang camat, saya kritik habis tuh lurah ama LPM. Jadi saya di kecamatan, masukin inputnya di kecamatan, kalo saya sih masih bisa. tapi kadangkala dari kelompok tani yang lain udah di kelurahan ga input, untuk di kecamatan juga ga input. Itu masalahnya. Trus dari kota, kayak penyuluh nih tidak mendampingi.” (wawancara tanggal 2 September 2017)

Dari penjelasan informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa partisipasi para petani terlihat dalam setiap tahapan kegiatan musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota. Meskipun respon yang diberikan oleh petani berbeda-beda namun keberadaan mereka dalam proses musrenbang memberikan warna tersendiri untuk perencanaan pembangunan pertanian ke depan. Informasi selalu diberikan oleh petani kepada pihak musrenbang baik secara pribadi maupun kelompok. Ada juga kelompok tani yang kurang aktif dalam musrenbang sehingga usulan terkait pertanian tidak ada yang muncul atau tidak terangkat ke permukaan. Pihak DKP3 Kota Depok berupaya terus melakukan pendampingan terhadap petani dalam kegiatan musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun kota. Sebagaimana yang dikatakan oleh AI, petugas penyuluh lapangan (PPL) Kecamatan Cimanggis,

“...saya sih sering diundang musrenbang, kalo di kecamatan Cimanggis sih sering tiap tahun, sesuai wilayah tugas aja. Fungsinya itu, satu, bahasanya

mengawal kalo ada usulan trus kedua yang terpenting terinformasikan, gitu. Bahasanya gini, kadang-kadang dari dinas ada perwakilannya, jadi selain penyuluh itu kadang ada lagi yang datang, entah kasi, atau kabit datang, gitu.” (wawancara tanggal 3 November 2017)

Hanya saja pendampingan yang dilakukan oleh DKP3 Kota Depok dirasakan belum optimal oleh petani. Hal ini yang kemudian dirasakan oleh petani sebagai ketidakaktifan pemerintah dalam upaya mengawal pertanian dari tingkat paling bawah. Usulan yang diajukan petani dalam musrenbang terkait dengan sarana pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Usulan yang diajukan yaitu terkait sarana produksi untuk meningkatkan produksi pertanian meskipun seringkali tidak diakomodir oleh musrenbang.

Mengenai peran OPD dalam musrenbang tingkat kelurahan dan kecamatan disampaikan oleh Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN “Kalau di (musrenbang) kelurahan harus dihadiri oleh OPD, karena disitu adalah proses penjaringan awal usulan prioritas pembangunan kota.” (wawancara tanggal 5 September 2017).

Namun hal sebaliknya dilontarkan oleh Kabid Ketahanan Pangan dan Hortikultura (KPH) DKP3 Kota Depok, HK bahwa,

“Musrenbang kelurahan kita tidak pernah diundang. Paling di tingkat kecamatan, itu juga jarang masalah pertanian. Ini yang jadi masalah ya. Pada saat pengawalan itu, pertanian jarang ada yang masuk. Akhirnya kami keteteran juga ya. Yah seperti itulah. Usulan pertanian tidak ada. Kenapa? Kami tidak tau ya. Karena yang punya peran di bawah itu kan lurah.” (wawancara tanggal 30 Agustus 2017)

Mengenai ketidakhadiran perwakilan OPD dalam hal ini DKP3 Kota Depok dalam kegiatan musrenbang untuk pendampingan masalah pertanian, Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN berkomentar,

“...harus datang karena biasanya disitu ada usulan masyarakat terkait dengan pertanian misalnya, terkait dengan perikanan. ... tidak datang ga masalah juga sebetulnya karena sifatnya undangan yah. ... dan yang pasti hadir yaitu tim dari bappeda. ...Yah, biasanya diundang dari OPD. Tapi

memang untuk pertanian itu lebih banyak usulan dari masyarakatnya itu tidak sebanyak yang sifatnya teknis eh, infrastruktur ya. ...Yah makanya mereka berpikir ga usah hadir ga apa-apa toh orangnya juga sedikit. Jadi mereka memilah aja. Pokoknya pada dasarnya setiap tahapan OPD itu harus datang, ya wajib datang. Masalah mereka nanti tidak datang tapi informasi itu akan kita informasikan kita sampaikan usulan masyarakatnya.” (wawancara tanggal 2 November 2017)

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka ketersediaan personal DKP3 untuk hadir dalam setiap tahapan musrenbang mesti diperhatikan secara seksama mengingat masalah pertanian yang kini dihadapi tidak hanya mengenai alih fungsi lahan namun juga berkaitan dengan keberadaan sumberdaya lokal yang kian tergerus.

Dengan memperhatikan informasi di atas maka musrenbang berfungsi sebagai sarana pengumpulan data dari masyarakat secara langsung atau pendekatan secara partisipatif dan *bottom-up*. Sehingga fungsi musrenbang adalah untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari masyarakat yang kemudian akan diringkas berdasarkan skala prioritas menjadi kegiatan yang tertuang dalam dokumen perencanaan seperti RKPD dan Renja OPD di tahun berikutnya. Demikian yang dinyatakan oleh Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN “Musrenbang adalah proses penjangkauan awal aspirasi masyarakat terkait dengan kebutuhan pembangunan di wilayahnya itu. Musrenbang itu diawali dengan pengumpulan data dan informasi dari RT, RW lalu naik ke kelurahan dan seterusnya.” (wawancara tanggal 5 September 2017).

Data merupakan faktor yang cukup penting dalam penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN:

“Data itu sebagai dasar kita melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang sudah dilakukan. Kalau data yang terkumpul tersebut belum sesuai

dengan target kita berarti kita harus melakukan intervensi atas program-program tersebut supaya tercapai target-target indikatornya. Pengumpulan data secara makro berasal dari BPS. Lalu data yang terkait dengan perencanaan kita dapatkan dari OPD. Data dasar seperti kependudukan, kesehatan masyarakat, pendidikan dan sebagainya. Kita himpun dalam satu data.” (wawancara tanggal 4 Agustus 2017)

Masih seputar pengumpulan data ini Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN menyatakan bahwa:

“Bappeda menggunakan data primer karena datanya diambil dari masyarakat langsung. OPD pun menggunakan data primer melalui FGD (*Focus Group Discussion*) dengan *stakeholdernya*. Data sekunder hanya untuk menguatkan saja apa yang mereka usulkan untuk jadi dasar pembangunan di tahun berikutnya. Jadi data sekunder hanya sebagai dasar evaluasi.” (wawancara tanggal 5 September 2017)

Dari informasi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa data yang digunakan dalam penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal ada dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung di lapangan melalui proses kegiatan musrenbang dan FGD di tingkat OPD, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yaitu studi literatur, data penyuluhan dan kelembagaan pertanian yang dikumpulkan dari mantri tani dan para petugas penyuluh lapangan (PPL). Data sekunder tersebut dijadikan bahan evaluasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

Terkait dengan pengambilan data, Kasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) DKP3 Kota Depok, HAF mengatakan bahwa “Biasanya dari tiap-tiap bidang ada data dan fakta yang selama ini dilapangan dijadikan acuan untuk menentukan ke arah mana kebijakan akan dilaksanakan. Dari kondisi eksisting dan data *time series* selama lima tahun serta data dari hasil musrenbang tersebut dijadikan patokan.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017). Diperkuat juga oleh pernyataan staf Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP) DKP3 Kota

Depok, RN bahwa, “Kalau data nanti dari bidang ya pak, dari bidang sendiri mereka ada pendataan.” (wawancara tanggal 28 Agustus 2017).

Pengambilan data dari lapangan DKP3 Kota Depok mengandalkan PPL yang sering berinteraksi dengan para petani. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kasubbag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP) DKP3 Kota Depok, LA “Kalau untuk mengetahui permasalahan, kita turun ke lapangan melalui penyuluh lapangan, lalu mereka yang melakukan pembinaan kelompok, dan menyampaikan info terbaru. Mereka menjadi ujung tombak ke petani.” (wawancara tanggal 1 Agustus 2017).

Hal tersebut dipertegas oleh Kasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) DKP3 Kota Depok, HAF yang mengungkapkan:

“Untuk bisa mengetahui permasalahan di lapangan, tupoksinya adalah dari PPL, sebagai jembatan komunikasi antara petani dengan dinas, pertemuan rutin antara *stakeholder* dengan petani, pertemuan tahunan berupa musrenbang, kegiatan lapangan, jadi bisa diketahui apa kebutuhan kelompok tani. Jadi data itu dapat dari PPL, musrenbang, data statistik. Pengumpulan data statistik pertanian tiap bulan dan triwulan. Di tingkat kecamatan ada mantri tani atau KCD, kepala cabang dinas. Secara rutin tiap bulan melaporkan tanam, panen dan produksi padi, palawija dan sayuran. Laporan triwulan buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias. Sedangkan PPL melaporkan kelembagaan, kelompok tani, jumlah anggota, dan sebagainya. Jadi datanya berbeda dengan mantri tani.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017)

Dari informasi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa data yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal adalah data yang diperoleh dari lapangan, dalam hal ini dari mantri tani dan petugas penyuluh lapangan (PPL) yang tersebar di sebelas kecamatan di Kota Depok. Data yang diperoleh dari mantri tani yaitu berupa data tanam, panen dan produksi padi, palawija dan sayuran yang dilaporkan tiap bulan, dan data buah-buahan, biofarmaka dan tanaman hias

setiap triwulan, sedangkan data yang diperoleh dari PPL berupa kelembagaan kelompok tani dengan waktu yang tidak ditentukan.

Namun terkait data dan informasi dari lapangan ini Ketua Kelompok Tani Kalilicin, Kecamatan Pancoranmas, NY mengkritisi dengan pernyataan bahwa,

“.. data real seharusnya (ada) di dinas atau di BPP cuman ga update, saya bilang ada cuman ga update, saya bilang seharusnya update data petani itu setiap enam bulan, itu sebenarnya tugas penyuluh tadi, kalo penyuluh sering ke lapangan, nulis kayak gini nih, Pak kelompok tani ada berapa? Enam bulan ke depan, Oh, ada yang kurang pak. Berikutnya, Oh, ada yang nambah pak, ada yang jadi petani baru. Itu kan dinamikanya baru tuh. Seharusnya dia punya database laporin BPP, BPP ke dinas, dinas laporin ke Bappeda. Itu kan terstruktur. Nah selama ini ga ada. Makanya kembali lagi, ketidakaktifan para penyuluh kita nih, (padahal) penyuluh kan ujung tombak dinas pertanian.” (wawancara tanggal 2 September 2017)

Penjelasan dari informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa data dan informasi yang dimiliki oleh DKP3 Kota Depok mengenai kelembagaan kelompok tani kemungkinan tidak *update* mengingat kekurangaktifan sebagian penyuluh dalam memperbarui data dari para petani. Dengan data dan informasi yang tidak *update* maka kemungkinan besar informasi yang diterima ke struktur di atasnya pun tidak *update*. Sehingga perencanaan ke depan hanya akan menghasilkan rekomendasi yang tidak tepat dan kurang terencana terkait permasalahan pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal.

Hasil penelusuran peneliti ke pihak BPP sendiri menunjukkan hal yang telah disebutkan oleh petani sebagai data yang tidak *update*. Baru-baru ini BPP melakukan pendataan ke kelompok tani guna dimasukkan ke dalam aplikasi simluhtan, Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Pertanian sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat, namun sayangnya saat akan mengakses simluhtan, dibutuhkan *username* dan *password* yang hanya bisa diakses melalui admin. BPP sendiri mengakui bahwa apa yang mereka lakukan belum bisa memenuhi ekspektasi petani. Pendataan yang belum ada yaitu

mengenai umur dan tingkat pendidikan petani. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BPP Sawangan sekaligus PPL Kecamatan Sawangan, HD, yakni,

“sebenarnya untuk data validnya akan lebih bagus langsung ke kelompok, kita langsung ketemu kelompok, langsung kita wawancara ketua kelompok, karena begini ada yang sudah meninggal orangtuanya dilanjutkan dengan anaknya, dan sebagainya, generasinya tentunya gampang ketemu kelompok, si “A” umurnya berapa, kan begitu, langsung dapat datanya, cuma nanti kalau dengan kita engga tau, karena data kelompok ini harus sesuai ... umurnya harus sesuai dengan KTPnya, kan gitu ya.”(wawancara tanggal 6 November 2017)

Pernyataan di atas diperkuat oleh Kepala BPP Ratujaya sekaligus PPL Kecamatan Pancoranmas, SUT, yang mengatakan bahwa,

“... kalau kita kebanyakan kan *supply* data dari pembentukan kelompok baru, biasanya kan calon pengurus dan anggota itu memberikan data tapi sebatas hanya nama dan jumlah pohon, tapi kalau untuk pendidikan dan umur, diabaikan karena merasa tidak penting bagi kita, yang penting saya bilang nama petani sama luas yang dipelihara kan gitu, sebab pada dasarnya akhirnya ke produktivitas dan produksi. Tidak kepada perkembangan pengkaderan.” (wawancara tanggal 6 November 2017)

Selain itu petani menambahkan bahwa seringkali apa yang dibutuhkan oleh petani tidak dimengerti oleh pemerintah yang disebabkan tidak berjalannya komunikasi antara petani dengan pemerintah. Terkait hal tersebut Ketua Kelompok Tani Kalilicin, Kecamatan Pancoranmas, NY menjelaskan:

“... kuncinya kita kurang komunikatif. Komunikasinya yang ga jalan. Okelah sekarang kita jemput bola aja. Kemaren kita nunggu nih. Setelah kita input, ternyata, oh gitu ya pak. Oh ternyata kita yang salah. Kita kurang komunikasi. Kita harus ngobrol termasuk ke DPRD, legislatif, eksekutif. Nah kita kurang nih (inputnya). Kayak kemaren ketemu Pak Wakil (Walikota), apa nih kebutuhannya. Sebenarnya masih (ada) respon, cuman tadi karena kita kurang input. Dari dinas teknisnya kurang input juga. Akhirnya jadi miskomunikasi. Apalagi sekarang pertanian perkotaan, *urban farming*, ... sayuran dengan hidroponik wah ini prospek nih! Saya bilang untuk contoh minta di balaikota, kan banyak *space* kosong tuh. Kalo ga dikasih bilangin ke saya. Saya mah bicara pertanian apa aja, ga cuman belimbing. Makanya kita pengennya dari POPT, penyuluh, dinas, petani, stakeholder, pengepul, kita ngobrol yuk, kerjasama.” (wawancara tanggal 2 September 2017)

Selain kegiatan musrenbang dan data lapangan, pengumpulan data juga didapatkan melalui proposal yang diajukan oleh kelompok tani, serta dari pokok-pokok pikiran anggota dewan. Kasubbag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP) DKP3 Kota Depok, LA mengungkapkan “Pengumpulan data ada dari proposal kelompok tani, terus dari pokok-pokok pikiran anggota dewan.” (wawancara tanggal 1 Agustus 2017).

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Kasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) DKP3 Kota Depok, HAF “Proposal itu biasanya didampingi PPL, secara komunikasi verbal belum bisa dituangkan dalam arah kebijakan, tapi dalam bentuk proposal dapat dipertimbangkan dalam arah kebijakan kita.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017).

Masih terkait pengumpulan data melalui proposal, Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Maju Bersama di Kecamatan Cimanggis, HG, mengungkapkan:

“(dengan proposal) paling gak, mungkin untuk dipenuhi permintaannya mungkin itu sudah hal yang kesekian ya. Tapi paling gak, kita nyampe, mereka baca jadi perhatian gitu. Tahun ini mungkin gak dapet, tahun depan mungkin dapet. Karena kan proposal itu ada beberapa alasan mungkin mereka gak bisaenuhi kan. Karena anggaran terbatas di tahun ini. Kan bisa dipindahkan ke tahun depan.” (wawancara tanggal 30 Agustus 2017)

Dari penjelasan informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa proposal juga bisa menjadi media yang efektif antara petani dengan pemerintah yang memuat kebutuhan kelompok tani. Harapannya komunikasi yang terbangun antara petani dan pemerintah dapat terjalin baik meskipun pemenuhan kebutuhan tidak terpenuhi saat itu juga. Proposal tersebut juga menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam membuat perencanaan tahun berikutnya.

Evaluasi program dan kegiatan periode tahun sebelumnya juga dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan pertanian untuk periode berikutnya. Hal

tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) DKP3 Kota Depok, HAF “kita ada evaluasi seperti LKPJ atau LAKIP, dari anggaran, capaian kegiatan, ipteknya, *out come* terhadap peningkatan kesejahteraan petani, bila arah kebijakannya tidak sesuai akan diadakan revisi renstra.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017).

Evaluasi program dan kegiatan periode sebelumnya dapat dilihat dari laporan kinerja instansi daerah. Evaluasi tersebut disajikan dalam bentuk evaluasi capaian kinerja program DKP3 Kota Depok.

Tabel 5.2 Pencapaian Target Kinerja DKP3 Kota Depok Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya jumlah kelompok tani aktif	Jumlah kelompok tani aktif	116	132	114%
2	Meningkatnya nilai tambah pertanian perkotaan	Kontribusi PDRB pertanian terhadap PDRB Kota	1,76%	1,76%	100%
3	Meningkatnya produksi komoditas unggulan	Jumlah produksi tanaman hias	1.654.689 tangkai	81.447 tangkai	5%
		Jumlah produksi belimbing	55.204 kwintal	2.724 kwintal	5%
		Jumlah produksi jambu biji merah	20.000 kwintal	7.184 kwintal	45%
4	Meningkatnya diversifikasi usaha pertanian	Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian	33 usaha	33 usaha	100%
5	Meningkatnya pengolahan hasil pertanian berbasis potensi lokal	Jumlah petani yang dilatih pengolahan hasil hortikultura	120 orang	120 orang	100%

Sumber: Laporan Kinerja DKP3 Kota Depok Tahun 2016, diolah

Dari Tabel 5.2 menunjukkan bahwa ada target kinerja yang belum tercapai yaitu produktivitas komoditas unggulan. Hal tersebut disebabkan menurunnya jumlah tanaman yang menghasilkan akibat alih fungsi lahan. Faktor-faktor tersebut perlu dipertimbangkan dalam penyusunan rencana pembangunan pertanian selanjutnya. Sehingga kontribusi PDRB hasil pertanian bisa ditingkatkan secara perlahan-lahan.

5.1.1.3 Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

Setelah data terkumpul maka selanjutnya dilakukan skala prioritas, mana kebutuhan yang mendesak dilakukan dan mana yang tidak mendesak. Mana kebutuhan yang turunannya banyak dan segera dilakukan, mana kebutuhan yang tidak memiliki turunan yang banyak. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN:

“Dalam menentukan tindakan kita melihat sisi urgensinya saja. Karena pemerintahan ini dilihat secara makro, semua hal kita hitung termasuk pelayanan wajib baik dasar maupun bukan dasar. Nah dari itu kita lihat mana yang urgen. Parameternya adalah apabila masalahnya kita selesaikan maka ikutannya banyak, contohnya kemacetan, atau banjir atau kemiskinan. Dari situlah dasarnya bahwa suatu permasalahan menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh Pemerintah.” (wawancara tanggal 4 Agustus 2017)

Lanjutnya,

“Untuk penentuan skala prioritas adalah yang pertama, harus masuk dalam perencanaan, dokumen RPJMD, renstra OPD, yang dituangkan ke dalam renja OPD serta ada pertimbangan tertentu misalnya program tersebut merupakan janji kepala daerah, lalu program tersebut merupakan masalah yang harus segera diselesaikan, dan ikutannya banyak. Kalau hanya pelatihan, maka harus terselenggara oleh lembaga yang terakreditasi sehingga hasil dari pelatihan tersebut dapat disalurkan ke tempat manapun.” (wawancara tanggal 4 Agustus 2017)

Senada dengan pendapat tersebut, Kasubbag Umum Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP) DKP3 Kota Depok, LA mengungkapkan bahwa “(untuk menentukan skala prioritas) nanti kita rekap, lalu per bidang mengolah apa saja yang perlu diprioritaskan sesuai target RPJMD dan renstra.” (wawancara tanggal 1 Agustus 2017).

Lebih khusus lagi mengenai prioritas komoditas unggulan, Kasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) DKP3 Kota Depok, HAF mengatakan:

“Setelah terkumpul data adalah menentukan tindakan sesuai arah kebijakan pembangunan. Untuk komoditas unggulan adalah dengan meningkatkan teknologi, misalnya dengan hormon pertumbuhan agar produksinya bertambah atau alat-alat pertanian mutakhir untuk

memangkas ongkos produksi. Penentuan prioritas dalam musrenbang, dari target renstra dan renja, misalnya meningkatkan produktivitas maka kita bantu dalam hal pemenuhan target di renja atau renstra.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017)

Saat ini yang menjadi prioritas sebagaimana tujuan pembangunan jangka menengah DKP3 Kota Depok yaitu meningkatkan ketahanan pangan berbasis potensi lokal. Kegiatan yang mengarah kepada ketahanan pangan berbasis potensi lokal adalah kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), yaitu pemanfaatan lahan pekarangan oleh masyarakat untuk ditanami tanaman sayuran dan buah. KRPL ini oleh DKP3 Kota Depok dijadikan konsep pertanian perkotaan atau yang dikenal sebagai *urban farming*.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Kasubbag Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP) DKP3 Kota Depok, LA bahwa “Prioritas kita lebih kepada pertanian perkotaan yakni ketahanan pangan seperti KRPL.” (wawancara tanggal 1 Agustus 2017).

Bahkan Kabid Ketahanan Pangan dan Hortikultura (KPH) DKP3 Kota Depok, HK, mempertegas bahwa,

“Kami tidak ada program prioritas. Karena di kami kan urusannya bukan urusan wajib. Urusan pilihan. Pertanian itu pilihan. Belimbing sendiri bukan urusan wajib yang harus di ini kan pak. Pertanian kan bukan urusan wajib, urusan wajibnya kan ketahanan pangan. Kalau ketahanan pangan betul, misal KRPL. KRPL, kawasan rumah pangan lestari yaitu pemberdayaan masyarakat terutama sekali pengadaan bahan pangan lokal khususnya sayuran. Jadi pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi itu program *urban farming*, bagaimana memanfaatkan lahan yang sempit itu.” (wawancara tanggal 30 Agustus 2017)

Hal tersebut didukung dengan data yang diperoleh dari dokumen Rencana Kerja DKP3 Kota Depok Tahun 2017 yang menunjukkan prioritas program DKP3 Kota Depok adalah peningkatan ketahanan pangan dan hortikultura sebagaimana tercantum di Tabel 5.3.

Tabel 5.3 Program Pembangunan Pertanian DKP3 Tahun 2017

No	Program	Jumlah Pagu (Rupiah)
1	Pengembangan Budidaya Pertanian	287.000.000
2	Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian	388.232.000
3	Pengawasan Produk Pertanian	384.740.000
4	Peningkatan Ketahanan Pangan dan Hortikultura: a. Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Peningkatan SDM Petani Tanaman Pangan dan Hortikultura	655.000.000
5	Promosi Hasil Produksi Pertanian	385.500.000

Sumber: DKP3 Kota Depok, 2017

Adapun belimbing sebagai komoditas lokal tetap akan diperhatikan dengan mengacu pada strategi dan kebijakan yang tercantum dalam Renstra DKP3. Berikut cakupan strategi dan kebijakan yang tercantum dalam Renstra DKP3 Tahun 2016-2021 yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pertanian dan penyuluhan melalui peningkatan kegiatan pemberdayaan petani dan kelompok tani, pelayanan bidang kesehatan hewan, pembangunan BBI dan RPH,
2. Meningkatkan pendapatan petani, peternak dan pembudidaya ikan melalui intensifikasi produk unggulan dari hulu hingga hilir,
3. Meningkatkan ketahanan pangan di tingkat keluarga melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi pangan, dan
4. Meningkatkan jaminan keamanan pangan melalui peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi.

Hortikultura, termasuk di dalamnya belimbing (buah-buahan), tanaman hias dan sayuran, masuk dalam target dan indikator program. Oleh karena itu DKP3 Kota Depok tetap berusaha untuk mempertahankan dan mengembangkan belimbing melalui peningkatan produksinya, serta membuat sertifikasi kelompok tani dan registrasi lahan. Kajian yang sedang digarap oleh DKP3 Kota Depok

adalah konsep agrowisata belimbing, meskipun ke depannya agak sulit untuk direalisasikan karena terbatasnya anggaran. Sedangkan konsep *urban farming* tengah digodok seperti apa wujudnya sebagai upaya transformasi dari pertanian tradisional ke pertanian modern.

Beberapa pernyataan mengenai belimbing dilontarkan oleh pihak DKP3 Kota Depok yaitu oleh Kasubbag Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP) DKP3 Kota Depok, LA yang menyatakan:

“(sedangkan) untuk komoditas unggulan masih belimbing, kita masih ada sertifikasi, registrasi mungkin hanya nomenklatur kegiatan saja yang berbeda. Belimbing ini kan masuk ke hortikultura. Hortikultura masuk dalam target dan indikator program. Bagaimana caranya kita berusaha mempertahankan agar produktivitasnya baik meskipun lahannya berkurang.” (wawancara tanggal 1 Agustus 2017)

Pernyataan di atas dipertegas lagi oleh Kabid Ketahanan Pangan dan Hortikultura (KPH) DKP3 Kota Depok, HK yang menyampaikan,

“Belimbing memang unggulan tapi kembali lagi ke luas lahan. Itu kan hanya sebagai imej aja kota belimbing itu kan. Kalau dari produksi malah semakin menurun. Belimbing sebagai unggulan lokal depok, kalau ikon itu kan orang yang menyebutnya demikian. Kalau ikon harus ada perdanya, selama ini ga ada. Depok kan kota baru, jadi setiap daerah ada ciri khasnya. Karena kalau ikon harus kontinyu, makanya tidak kita perda-kan. Konsep *urban farming* masih dalam tahap kajian. Kita juga ada kajian sawah, LP2B, apakah tetap dipertahankan atau misalkan bagaimana. Terus belimbing juga apakah dijadikan agrowisata. Kalau memang jadi agrowisata, kajian belum. Kita sedang mengkaji dulu nih, kira-kira gimana. Kan belimbing itu ikon ya, jadi sayang (kalau dibiarkan). Agrowisata agak sulit ya, karena melihat anggaran, ga bisa. Belimbing juga kan adanya bukan di kebun, adanya pemanfaatan lahan pekarangan. Kalau mau dijadikan agrowisata apa ya gitu kan. Nah itu infrastrukturnya juga harus kita siapkan. Nanti hasil dari kajian ini baiknya seperti apa.” (wawancara tanggal 30 Agustus 2017)

Dari informan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa konsep *urban farming* maupun agrowisata sama-sama masih dalam tahap kajian tentang wujud yang tepat yang akan diterapkan di Kota Depok. Pemanfaatan lahan sempit yang ada di Kota Depok secara optimal didayagunakan secara mudah dan murah dengan

ditanami tanaman produktif yang langsung dimanfaatkan oleh konsumen dan tidak memerlukan perawatan mahal. Bentuk pemanfaatan lahan sempit tersebut adalah KRPL. Sedangkan agrowisata perlu pertimbangan yang cukup kompleks dan masih ada keraguan di pihak pemerintah, dalam hal ini DKP3 karena terkait penyediaan infrastruktur dan ketersediaan anggaran.

Masih mengenai prioritas ketahanan pangan dan hortikultura, serta konsep yang berkaitan dengan belimbing, Kasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) DKP3 Kota Depok, HAF mengatakan:

“Prioritas kita mengembangkan komoditas unggulan dan komoditas utama. Komoditas utama adalah padi namun tidak mengacu pada produksi tapi ke nilai ekonomis misalnya padi yang memiliki nilai kesehatan seperti padi merah. Meski bukan kawasan produksi namun memiliki ciri khas untuk padi. Palawija juga tetap kita kembangkan. selama masih ada permintaan ya kita kembangkan. Mungkin kita lebih konsern ke sayuran karena bisa dijadikan sebagai tanaman yang bisa ke pertanian perkotaan dengan sistem vertikultur, hidroponik dan sebagainya. Dengan teknologi itu cocoknya ya dengan sayuran karena bisa ditanam di media tanam yang tidak memerlukan lahan yang luas.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017)

Lebih lanjut beliau menyampaikan,

“Sedangkan untuk belimbing, merupakan komoditas komparatif ya, karena tidak dimiliki wilayah lain, kita tempatkan ke arah peningkatan produktivitasnya dan mungkin nanti agrowisata yang masih dalam tahap kajian supaya tidak tergerus pembangunan yang pesat karena kita kan kota metropolitan, jadi konsepnya ya agrowisata, lahannya ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau dan daerah wisata. Namun belum ada peraturan khusus untuk melindungi kawasan hortikultura, baru sebatas Ruang Terbuka Hijau. Akan dikaji lebih lanjut tergantung kebijakan pemangku jabatan yang lebih tinggi. Kalau dari Dinas tetap berupaya agar belimbing sebagai komoditas unggulan tetap eksis dan menjadi produk kebanggaan kota. Pak Walikota sendiri menyebut belimbing sebagai ikon produk Kota Depok, tidak lagi ikon Kota Depok.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017)

Dari informan tersebut dapat dijelaskan bahwa ke depan konsep yang mungkin akan diterapkan dalam mendukung program ketahanan pangan dan hortikultura dapat berupa kegiatan *urban farming* seperti KRPL, vertikultur, hidroponik atau agrowisata belimbing. Perlindungan lahan belimbing yang tersisa

di Kota Depok baru bisa diupayakan melalui perda sebagai kawasan RTH. Meskipun bukan lagi sebagai ikon kota, belimbing tetap menjadi komoditas unggulan lokal yang akan dikembangkan di lahan terbatas.

Pada kepemimpinan Walikota Depok periode sebelumnya, belimbing dijadikan sebagai ikon. Namun saat ini tagline *friendly city* telah menjadi *city branding* yang bernuansa keterbukaan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasubbid Infrastruktur Permukiman dan Sumberdaya Alam Bappeda Kota Depok, YL:

“... *next*, kita ke depan tidak lagi memprioritaskan sebagai kota belimbing. Sekarang ini *trend marknya* adalah *friendly city*. Jadi bukan kota belimbing. Pimpinan sudah berganti, dan upaya ketersediaan lahan juga sulit, orang-orang pertanian juga semakin terbatas. *Friendly city* menjadikan kota itu nyaman dari segala apapun. Belimbing lebih diarahkan ke pertanian perkotaan, bukan hanya produksinya tapi juga marketingnya.” (wawancara tanggal 28 Agustus 2017)

Dari kalangan petani sendiri tidak mempersoalkan *city branding* tersebut asalkan tidak menjadi alasan untuk melupakan komoditas lokal. Hal demikian disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani Kalilicin, Kecamatan Pancoranmas, NY bahwa “tugas kabid, kasi, kepala BPP belum jalan. Kepala dinas mesti diinput soal pertanian. Bodo amat visi misi kota apa kek. Kayak apa sekarang, Depok *friendly city*, itu mah bodo amat. Tugas kita orang pertanian ya ngomong pertanian.” (wawancara tanggal 2 September 2017).

Mengenai perubahan ikon tersebut Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN menjelaskan bahwa

“...kalau bicara ikon yang diubah pada dasarnya Depok itu kan ketika bicara ikon Belimbing, tidak ada aturan yang menyatakan bahwa belimbing ini ikon. Jadi misalnya dibilang ikon Depok hilang, selama ini kita tidak pernah mengklaim. Hanya klaim aja. Tapi tidak pernah ada ketentuan bahwa yang menjadi ikon Depok itu adalah belimbing. Karena dulu setiap kota/kabupaten diwajibkan membuat ikon.” (wawancara tanggal 2 November 2017)

Dengan memperhatikan hal tersebut penggantian ikon ini belum tersosialisasi dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat mengingat masih banyak yang belum memahami hal ini. Berdasarkan penelusuran dokumen yang diperoleh peneliti, ikon Depok a *friendly city* bermakna pertama, sebagai *house of brand* yaitu “rumah” bagi produk, jasa, tempat dan orang di Depok termasuk buah belimbing, dan kedua, sebagai *brand endorsement* yaitu dukungan merek bagi produk, jasa dan tempat yang dikelola oleh Pemerintah Kota Depok berupa Taman, dan Pusat Pelayanan Kota.

Bahkan Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN secara detail mengungkapkan bahwa,

“ ... tapi di dalam *friendly city* ada sahabat petani. Petaninya petani apa aja, boleh belimbing, mau apa,, nah ketika bicara petani berarti kan kalau bicara masalah pendekatan politik sebetulnya di *friendly city* kemungkinan kita membuat pertanian hortikultura tetap berkembang, banyak. Karena ternyata sekarang itu ada setiap satu bulan sekali pemerintah kota itu bikin pasar tani, tujuannya apa, tujuannya adalah untuk mendorong petani-petani hortikultura ini bisa berkembang, berdaya. ... Disini, di balaikota. Nah itu jadi.. sebetulnya kalau dari sisi politik ada upaya-upaya gitu loh, menghilangkan ikon ininya, tapi kita mengangkat yang lainnya. Gitu. Petani tidak hanya belimbing. Bisa macam-macam. Nah itu. Jadi kalau.., kebijakan pembangunannya malah lebih makro, tidak hanya menjadikan belimbing, karena apa, karena ternyata sekarang petani belimbing kan semakin berkurang.” (wawancara tanggal 2 November 2017)

Artinya dengan perubahan ikon pemerintah ingin menekankan bahwa justru membuka peluang yang lebih besar terhadap pengembangan komoditas lokal terutama belimbing, sekalipun dihadapkan pada keterbatasan lahan. Sehingga ke depan perencanaan pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal diharapkan dapat mewujudkan komoditas lokal yang berdaya saing ke tingkat global.

Rancangan akhir rencana pembangunan berupa draf atau rancangan RKPD disusun sebelum tanggal 31 Mei sebagaimana hasil wawancara

sebelumnya. Draf atau rancangan RKPD ini menjadi acuan dalam penyusunan rancangan rencana kerja tiap OPD. Seluruh proses ini dikawal oleh Bappeda sebagai unsur perencanaan sebagaimana diungkapkan oleh Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN "...Semua proses itu, bahkan Renja mereka itu harus diverifikasi oleh kita lagi. Sampai jadi ke nanti masuk RKA, sampai ke DPA. Nah untuk RKA, DPA itu nanti masuk di BKD, badan keuangan." (wawancara tanggal 1 November 2017).

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Kasubbid Perencanaan Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, JUM, bahwa, "kalau dokumen itu nanti kita jadikan bahan untuk penyusunan rencana tahunan, RKPD, mekanismenya dari bawah, kita dokumentasikan, kita bahas, dan dijadikan satu rumusan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang dilaksanakan oleh OPD." (wawancara tanggal 11 September 2017).

5.1.1.4 Penetapan rencana

Dari seluruh paparan yang telah dikemukakan dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal mengacu pada RPJMD dan Renstra OPD. RPJMD dan Renstra berisi tentang tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program prioritas sebagai hasil penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih. Setelah itu diadakan sosialisasi perencanaan pembangunan tahun berjalan (T1) yang bertujuan menginformasikan kegiatan yang akan dijalankan tahun ini, kemudian diadakan FGD isu strategis (T2) untuk membahas isu-isu yang kemungkinan muncul tahun berikutnya, pengadaan FGD RKPD serta konsultasi publik sebagai media sosialisasi isu-isu strategis. Setelah itu dilakukan tahapan musrenbang mulai dari kelurahan hingga kota dan Forum Renja OPD.

Hasil akhir dari seluruh kegiatan tersebut berupa draf RKPD yang akan ditetapkan sebagai RKPD. Penetapan rencana pembangunan dilakukan oleh Walikota tanpa melalui pembahasan dengan DPRD. Artinya penetapan RKPD ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota (Perwal). Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN menerangkan “Proses Perencanaan itu kan mulainya dari Januari sampai ke Mei tanggal 30. Nah Mei ini adalah Penetapan. Penetapan RKPD, perencanaannya oleh Walikota dalam bentuk Perwal, ga dibahas oleh Dewan.” (wawancara tanggal 1 November 2017).

Usulan-usulan masyarakat terkait persoalan pertanian menjadi bagian integral dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu sejak awal harus dibangun sinergi antara pemerintah dan masyarakat bahwa dalam jangka panjang persoalan pertanian terutama sumberdaya lokal menjadi isu sentral dalam perencanaan pembangunan daerah.



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Gambar 5.3 Alur penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal

5.1.2 Faktor-faktor yang Mendukung dan yang Menghambat Perencanaan Pembangunan Pertanian Hortikultura Berbasis Sumberdaya Lokal

5.1.2.1 Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan, baik eksternal maupun internal memainkan peran yang signifikan dalam mendukung dan menghambat perencanaan pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal. Faktor lingkungan mencakup aspek sosial, budaya, ekonomi dan politik. Aspek sosial-ekonomi dalam konteks perencanaan pembangunan daerah selalu diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kota Depok sebagai kota metropolitan mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat seiring dengan penambahan jumlah penduduknya. Pada akhirnya kebutuhan hidup pun harus terpenuhi dengan menyediakan berbagai macam kebutuhan berupa makanan, lahan dan lapangan pekerjaan. Konsekuensi penambahan jumlah penduduk di Kota Depok adalah tergesurnya lahan pertanian, hilangnya sumberdaya lokal, transformasi sosial-budaya dari perdesaan ke perkotaan, dan alih mata pencaharian di sektor primer. Dengan kata lain pembangunan sebagai wujud perencanaan harus menghadapi dampak negatif yang ditimbulkannya. Hal demikian disampaikan oleh Kasubbag Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP) DKP3 Kota Depok, LA:

“Faktor lingkungan, untuk internal sih kondusif ya, kita bisa bekerjasama dan menjalankan tugas dan fungsi kita. Kalau eksternal, mungkin pembangunan ya karena terkait perubahan lahan. Faktor sumberdaya, maksudnya lahan ya, misalnya belimbing kan perlu lahan yang besar. Terus sumberdaya manusianya (yakni petani). Petani kita berkurang. Karena regenerasinya tidak jalan. Biasanya pendidikan anaknya lebih tinggi, tidak tertarik jadi petani memilih profesi lain.” (wawancara tanggal 1 Agustus 2017)

Senada dengan pendapat tersebut, Kasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) DKP3 Kota Depok, HAF mengungkapkan:

“... dorongan eksternal dari pembangunan itu sendiri, dalam arti banyaknya kebutuhan tempat tinggal, tentunya menyerap populasi penduduk, itu juga berpengaruh pada kebijakan kita terhadap kawasan pertanian. Kemudian faktor internal, dari petani, terjadi alih profesi, pokoknya dari kebutuhan manusia itu sendiri.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017)

Lebih lanjut beliau menerangkan,

“Permasalahan yang dihadapi, keterbatasan lahan, budaya masyarakat, bertransformasi ke arah metropolitan, sehingga petani beralih profesi demi memenuhi kebutuhan hidup, regenerasi dari petani itu sendiri, anak-anaknya tidak melanjutkan profesi orangtuanya.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017)

Dengan memperhatikan hal di atas, alih fungsi lahan secara signifikan terjadi pada lahan yang telah diperuntukkan bagi pertanian seiring peningkatan jumlah pemukiman dan industri. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.4 Penggunaan Tanah di Kota Depok Tahun 2006-2013

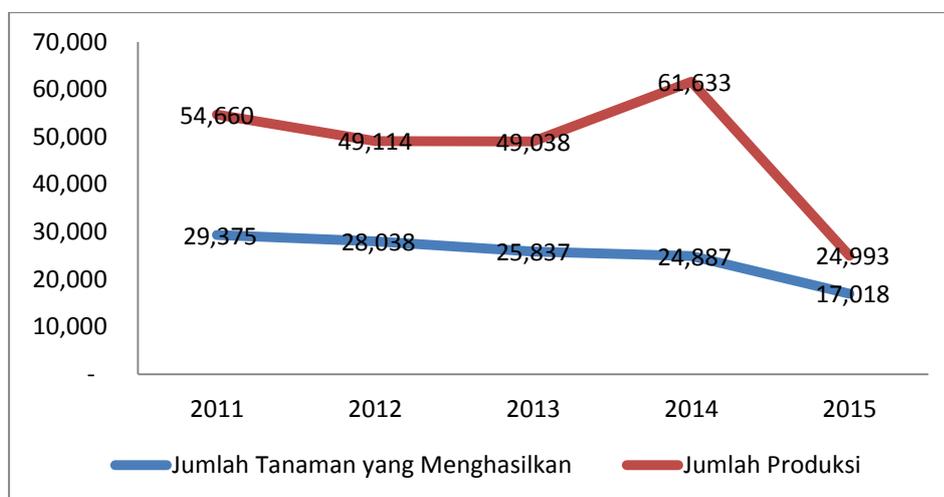
PENGUNAAN TANAH	LANDUSE LUAS (Ha)		PERUBAHAN	
	2006	2012	2006-2012	%
Permukiman Teratur (Perumahan)	2.752,50	3.541,01	788,51	28,65
Permukiman Tidak Teratur (Perkampungan)	7.226,53	8.008,83	782,30	10,83
Perdagangan dan Jasa/Perkantoran	149,14	157,11	7,97	5,34
Pendidikan Tinggi	185,29	214,58	29,29	15,81
Industri	207,58	251,79	44,21	21,30
Kawasan Khusus	77,73	77,73	0,00	0,00
Kawasan Tertentu	52,86	68,20	15,34	29,03
Pariwisata Lap Olahraga	327,46	326,17	-1,29	-0,39
Hutan Kota	7,22	7,22	0,00	0,00
Kebun/Tegakan Pohon/Tanaman	2.637,00	1.793,20	-843,80	-32,00
Ladang/Tegalan/Lahan Kering	3.485,03	3.383,52	-101,51	-2,91
Rumput/Semak/Tanah Kosong	1.494,95	1.366,51	-128,44	-8,59
Sawah	945,00	232,37	-712,63	-75,41
Setu	138,68	142,20	3,52	2,54
Empang	260,00	376,52	116,52	44,81
Sungai	82,05	82,05	0,00	0,00

Sumber: Bappeda Kota Depok

Tingginya penggunaan tanah untuk pemukiman dan industri menyebabkan berubahnya fungsi lahan yang semula areal sawah atau kebun menjadi bangunan permanen. Alih fungsi lahan yang terjadi lama-kelamaan akan menggusur lahan sumberdaya lokal. Bila tidak dikendalikan maka akan sulit untuk mencegahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Kepala BPP Sawangan sekaligus PPL Kecamatan Sawangan, HD, bahwa “... di Limo ada enam ratus

pohon belimbing, lebih kurang, itu kemungkinan akan jadi tol, itu akan habis, yang enam ratus batang, lebih kurang, akan kena imbasnya, paling tinggal berapa lagi lah, nah ini kan persoalan-persoalan kita.” (wawancara tanggal 6 November 2017). Hal yang serupa disampaikan oleh PPL Kecamatan Cimanggis, AI, mengenai keberadaan lahan belimbing yang masih ada di sekitar kawasan Pancoranmas, bahwa, “itu sebenarnya bukan daerah ramai, tapi nanti kalo jadi tol, kalo udah kepotong tol Cinere, nah jadi, malah bisa duluan mereka yang habis lahannya.” (wawancara tanggal 6 April 2017).

Belimbing sebagai sumberdaya lokal Kota Depok memiliki peran penting dalam menunjang sektor perekonomian yang ditandai dengan produktivitas belimbing meskipun dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hal tersebut ditunjukkan pada gambar di bawah ini.



Sumber: DKP3 Kota Depok, data sekunder diolah

Gambar 5.4 Jumlah Tanaman Belimbing dan Produksinya Tiap Tahun

Selain peningkatan pemukiman dan industri, komitmen petani untuk dapat mempertahankan lahannya juga dirasakan masih lemah mengingat kebutuhan yang harus dipenuhi oleh mereka sendiri untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Hal tersebut nampak dari penjualan lahan belimbing oleh petani ke pihak pengembang untuk dijadikan lahan pemukiman atau bangunan permanen.

Sebagaimana hal tersebut disampaikan oleh PPL Kecamatan Cimanggis, AI, bahwa, “kalau saya sih sering ngeledekin ke petani, “*Beh, kalau pohon udah tinggi dijualin nih*”, emang terbukti, orang punya seribu, dijual limaratus, buat anak kuliah, katanya. Besoknya pas kita pembinaan, lahannya udah dipatok orang.” (wawancara tanggal 6 April 2017).

Hal ini justru kebalikan dengan upaya pemerintah untuk menambah ruang terbuka hijau (RTH) termasuk untuk menyelamatkan lahan belimbing yang tersedia. Hal demikian dikatakan oleh Kasubbid Infrastruktur Permukiman dan Sumberdaya Alam Bappeda Kota Depok, YL “Di masyarakat itu yang terjadi kesadaran untuk mentaati peraturan tata ruang agak sulit ya.” (wawancara tanggal 28 Agustus 2017)

Lanjut beliau,

“dengan berpedoman pada RTH maka harus dikembalikan fungsinya sebagai RTH, tapi kan semuanya dibatasi oleh kepemilikan lahan. Kalau warganya keberatan dan kita tidak sanggup membayarnya dengan APBD ya memang agak sulit untuk mengontrolnya. Apalagi kalau sudah sertifikat hak milik dan APBD tidak mampu mendanainya, ya sulit. (Solusinya) pertama, kita tetap berpedoman pada tata ruang dalam proses pembangunan fisik, terus kedua, kita mengajak masyarakat untuk memahami aturan untuk menyadarkan masyarakat bahwa memang penetapan tata ruang itu perlu untuk ya itu tadi, untuk keberlanjutan lingkungan.” (wawancara tanggal 28 Agustus 2017)

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan RTH pun tetap dibatasi oleh kepemilikan lahan oleh yang bersangkutan kecuali ada tindakan tegas dari pemerintah dan komitmen dari petani untuk mempertahankan lahannya. Solusi yang ditawarkan oleh pemerintah yaitu tetap mengacu pada aturan tata ruang dan mengajak masyarakat agar memahami bahwa betapa pentingnya keberadaan tata ruang bagi keberlanjutan lingkungan perkotaan.

Upaya untuk mempertahankan lahan belimbing oleh sebagian petani masih kuat sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Maju Bersama, Kecamatan Cimanggis, HG bahwa “kalau lahan saya sih prosesnya gimana bilanganya ya, ya tetap saya mau bertahan, karena punya potensi.” (wawancara tanggal 30 Agustus 2017)

Bahkan komitmen yang sangat kuat ditunjukkan oleh Ketua Kelompok Tani Kalilicin, Kecamatan Pancoranmas, NY bahwa:

“kalau kita orang pertanian, kudu mempertahankan pertanian dengan berbagai argumen, contohnya berapa dana yang dikeluarkan pemda untuk membuat ruang terbuka hijau seperti yang ada sekarang ini antara pohon belimbing dengan taman. Misalkan per meter persegi untuk taman itu berapa duit, selama ini kalo dari petani mandiri, dengan sendirinya. Berapa oksigen yang dihasilkan oleh para petani dari tanaman belimbing. Coba buka buku besar, kamus, satu tanaman itu menghasilkan berapa oksigen. Apakah pemerintah sudah menghitung berapa keuntungan yang dihasilkan dari para petani secara cuma-cuma untuk kota. Kalo di negara maju itu dapat subsidi. Betul. Lah kalo kita kan kerugian kita tanggung sendiri.” (wawancara tanggal 2 September 2017)

Dari penjelasan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa petani berharap pemerintah kota dapat bekerjasama dengan petani untuk menyelamatkan lahan yang ada dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti keseimbangan ekologis dan aspek ekonomi. Keseimbangan ekologis dilihat dari sumbangan oksigen yang dilepaskan dari lahan belimbing para petani ke atmosfer Kota Depok, sedangkan aspek ekonomi dilihat dari perbandingan anggaran yang dikeluarkan pemda untuk membuat taman baru dibandingkan dengan anggaran membuat RTH dimana terdapat lahan belimbing yang sudah dikelola petani.

Bahkan Kabid Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat Bappeda Kota Depok, DI, menyatakan bahwa “walaupun memang (sumbangan PDRB) sektor pertanian kecil, tapi kita kan tetap harus mempertahankan. Karena kebanyakan petani di Depok ini petani penggarap bukan pemilik lahan. Harusnya kita

kaitannya untuk mempertahankan lebih kepada sistem pertanian perkotaan ya.” (wawancara tanggal 28 Agustus 2017).

Dengan memperhatikan hal tersebut jelas bahwa sektor pertanian masih menjadi harapan karena adanya komoditas lokal yang secara komparatif memiliki keunggulan dibandingkan daerah lain. Sehingga meskipun sumbangan PDRB dari sektor pertanian kian menurun, namun ke depan kontribusi dari sektor ini perlu ditingkatkan dengan menerapkan konsep pertanian perkotaan dan menambah produktivitasnya melalui teknologi budidaya atau pemasarannya.

5.1.2.2 Faktor Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia merupakan motor penggerak perencanaan dan pelaksanaannya yang menentukan kualitas perencanaan yang dihasilkan. Kualitas perencanaan yang baik lebih memungkinkan tercipta oleh SDM yang tepat dan berkualitas. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Kasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) DKP3 Kota Depok, HAF:

“Kalau faktor sumberdaya manusia juga berpengaruh. Karena kalau penempatan dari para pemangku jabatan tidak tepat maka tidak akan mengerti bagaimana mengkondisikan arah kebijakan menjadi lebih baik. Jumlah SDM perencana terasa kurang. Tidak ada yang spesialis.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017)

Sumberdaya manusia yang berperan penting dalam perencanaan adalah perencana. DKP3 Kota Depok belum memiliki tenaga fungsional perencana, sehingga saat ini yang berperan utama dalam perencanaan adalah Kasubbag Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasubbag Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP), LA “Tim perencana hanya Bu Sekdis (sekretaris dinas), saya dan satu orang staf. Pada saat perencanaan, bendahara-bendahara atau staf teknis yang

lain turut berpartisipasi. Tapi untuk mengelola satu dinas, ya kami.” (wawancara tanggal 1 Agustus 2017).

Berdasarkan data pegawai lingkup DKP3 Kota Depok, jumlah aparatur struktural di lingkup DKP3 Kota Depok sebanyak 50 orang, sedangkan aparatur fungsional penyuluh sebanyak 17 orang. DKP3 Kota Depok belum mempunyai tenaga fungsional perencana.

Mengenai tenaga fungsional perencana, Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN menguraikan bahwa,

“Fungsional perencana di setiap OPD mungkin hanya satu atau dua. Di Bappeda sendiri mungkin tidak banyak, kalau dibandingkan prosentasenya dari 50 ASN misalnya di Bappeda, aparat fungsional perencana paling hanya 8 orang . Kalau sisi jumlah memang tidak *balance*. ... Tim perencana itu pejabat struktural masuk, staf biasa juga masuk, fungsional non perencana juga masuk. Tapi kalau secara spesifik fungsional perencana memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Baru dikatakan sebagai fungsional perencana apabila dia sudah dilantik, tapi mungkin mereka secara pribadi sudah melakukan bimtek perencanaan, atau pelatihan perencanaan pasti sudah ada. Jadi secara kapasitas walaupun bukan fungsional perencana mereka pasti memiliki kapasitas sebagai perencana. Kayak UPEP, itu selalu diberikan pelatihan kan untuk penyusunan dokumen perencanaan, baik renstra, RPJMD maupun dokumen perencanaan yang lain. Karena RKPD sendiri merupakan dokumen perencanaan. Jadi sedikit banyak mereka harus paham bagaimana menyusunnya.” (wawancara tanggal 5 September 2017)

Pendapat tersebut menyatakan bahwa sekalipun OPD tidak memiliki aparatur fungsional perencana, namun mereka bisa membuat perencanaan dengan baik apabila mereka senantiasa rutin mengikuti pelatihan atau bimbingan teknis terkait perencanaan. Jumlah personel fungsional perencana yang tidak sebanding dengan jumlah ASN secara keseluruhan menyebabkan tenaga struktural dilibatkan dalam perencanaan. Sedangkan para Kasubbag Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP) di tiap OPD menjadi penggerak utama dalam penyusunan perencanaan.

Sumberdaya manusia berikutnya adalah petani. Sebagus apapun penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal, bilamana tidak ada petani maka perencanaan tersebut sia-sia belaka karena tidak memiliki obyek atau sasarannya. Oleh karena itu petani disini tidak saja berperan sebagai obyek namun juga dapat berperan sebagai subyek dari pembangunan karena dapat memberikan masukan kepada pemerintah terkait perencanaan pertanian. Hal tersebut sebagaimana telah ditunjukkan sebelumnya oleh para petani yang secara sukarela datang untuk berpartisipasi dalam tahapan kegiatan musrenbang. Hanya saja dalam perkembangan selama ini petani terbagi menjadi dua tipe yaitu petani yang aktif, dimana mereka mau terlibat dalam pembinaan kelompok yang dilakukan oleh para penyuluh, serta petani yang malas dalam kelompok, dimana mereka cenderung menjadikan pertanian sebagai pekerjaan sampingan, bahkan lahannya sendiri disewa ke orang lain untuk digarap. Sebagaimana dijelaskan oleh petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kota Depok, SAM:

“Rata-rata yang masih eksis di petani, yang petaninya masih gampang diatur lah, masih tetap ama dinas, masih tetap ama penyuluh, kalo udah jauh dari penyuluh ya udah, jadi kaya pandangannya beda, jadi kalo dibina juga untuk ngumpul kelompok juga susah, jadi dari satu kelompok yang aktif paling banyak enam, enam orang, misal dari satu kelompok duapuluh, duapuluh lima, pokoknya yang aktif enam orang, apa ... yang gampang dibina, karena dia kebanyakan itu yang saya bilang tadi, kaya apa sih ... sampingan, kaya kerja bangunan, trus ngojek, jadi kebunnya ini nih yang pernah saya tau, malah disewa ke orang lain, dikontrak, jadi orang lain yang ngerjain, banyak yang kaya gitu.” (wawancara tanggal 6 April 2017).

Selain itu banyak petani yang menjual lahannya ke orang lain demi menutupi kebutuhan hidup mereka dan keluarganya. Antara kesadaran untuk mempertahankan lahan dengan desakan kebutuhan hidup yang seiring waktu terus bertambah menyebabkan kondisi lahan belimbing semakin terpuruk. Perlahan namun pasti belimbing sedang menuju kepunahannya bila alih fungsi

lahan baik yang disebabkan oleh pembangunan maupun oleh petani itu sendiri tidak segera dicegah. Kabid Ketahanan Pangan dan Hortikultura (KPH) DKP3 Kota Depok, HK, telah menjelaskan bahwa,

“itu kan gini ya, kalau perencanaan dari dinas, lahan itu makin berkurang seiring dengan jumlah penduduk. Apalagi lahan di Depok itu kan turunan ya pak, warisan. Nah akhirnya tidak bisa dipertahankan lagi, dia butuh karena rumah, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Di awalnya memang belimbing itu bukan skala luas, tapi memang di pekarangan-pekarangan. Jadi kalau misalkan sekarang lahannya makin berkurang memang dari dulunya juga begitu kita juga sudah mempersiapkan karena memang kita dulu berbicara bukan di lahan yang luas, tapi pemanfaatan lahan pekarangan.” (wawancara tanggal 4 April 2017).

Peran para petugas lapangan juga tidak bisa diabaikan mengingat fungsi mereka sebagai penghubung antara pemerintah dengan petani. PPL dan POPT dianggap sebagai perpanjangan tangan DKP3 Kota Depok ke petani. Dari petugas inilah seluruh data dan informasi mengenai petani dan kelembagaannya didapatkan. Tak ayal istilah “ujung tombak” pun disematkan pada mereka. Meskipun seringkali kehadiran mereka tidak dimaksimalkan oleh para petani sebagaimana yang diungkapkan oleh PPL Kecamatan Cimanggis, AI,

“saya juga secara pribadi, kalo datang ke mereka, *“Tong lo ga usah ngajarin gua belimbing, gua udah pintar”*, *“siap pak, numpang ngopi doank”*, sering saya gitu, cuman saya tetap aja nongkrong, ntar pasti dia ada ini, *“kenapa banyak ulat ya?”* baru POPT, kalo orang kan kadang gitu mas, apa ... psikologisnya, kalo kita ngedrop di awal, ya dia tambah benci kan.” (wawancara tanggal 6 April 2017).

Peran petugas lapangan yang demikian menjadi tulang punggung pemerintah dalam menyerap segala informasi langsung dari petani. Informasi inilah yang menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembangunan pertanian. Sejauh ini peran penyuluh selalu aktif dalam melakukan pembinaan di kantong-kantong hortikultura terutama belimbing.

5.1.2.3 Faktor Sistem Perencanaan

Perencanaan pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal di Kota Depok mengacu kepada beberapa peraturan yaitu UU No.25 Tahun 2004 tentang SPPN, UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri No.86 Tahun 2017. Selain peraturan tersebut terdapat pula peraturan daerah yang dijadikan dasar pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yaitu Peraturan Walikota (Perwal) Depok Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Hal tersebut menunjukkan aspek hukum dan legalitas dalam penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal. Artinya secara legal formal perencanaan dapat disusun dan dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam sistem perencanaan terkandung mekanisme, prosedur, dan kebijakan sebagaimana disampaikan oleh Kasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) DKP3 Kota Depok, HAF "Faktor pertama yang mempengaruhi perencanaan yaitu arah kebijakan walikota, atau kepala daerah. Daerah yang baru, memiliki visi misi sendiri. Kita mesti mengikuti mekanisme, arah kebijakan pimpinan daerah." (wawancara tanggal 3 Agustus 2017).

Ada juga yang memandang bahwa sistem perencanaan hanya bersifat sarana sebagaimana diungkap Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN:

"Kalau sistem, itu hanya sebagai *tools*, untuk mempermudah dan sampai saat ini tidak ada masalah. Karena kita menggunakan sistem perencanaan SATDA, satu data. Perencanaannya masuk ke dalam RKPD online. Dan semuanya sudah terintegrasi. Dan ada sistem evaluasi juga yang namanya SIEVKA (Sistem Evaluasi Kinerja Anggaran) dan SIEP (Sistem Evaluasi dan Pelaporan). Dan semuanya sudah terintegrasi. Kalaupun belum sempurna, itu kan masih berjalan." (wawancara tanggal 5 September 2017)

Sekalipun bersifat sarana, sistem perencanaan tetap dibutuhkan dalam memudahkan penyusunan rencana pembangunan apalagi yang telah berjalan baik dan terintegrasi secara *online*. Hanya saja sistem yang dimaksud di atas adalah teknologi yang akan dijabarkan kemudian. Justru sistem perencanaan yang berupa mekanisme, arah kebijakan dan visi-misi kepala daerah menentukan bagaimana “wajah” perencanaan ke depan. Dan yang terjadi saat ini adalah harapan petani tetap menginginkan keberlanjutan sektor pertanian hortikultura sekalipun terjadi penggantian ikon. Konsekuensi penggantian ikon belimbing menjadi *friendly city* cukup memberi *shock therapy* kepada petani bahwa dukungan pemerintah belum tentu berlanjut sehingga petani harus secara mandiri berusaha agar belimbing dapat bertahan dan dikenal ke seluruh lapisan masyarakat.

5.1.2.4 Faktor Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Ilmu dan teknologi yang kini tengah digenjut dan dikembangkan adalah teknologi pertanian yang mencakup pengembangan sarana produksi, pengolahan bibit, panen dan pasca panen sehingga dapat memberikan kemajuan di sektor pertanian. Sebagaimana pernyataan yang diungkap oleh Kasubbag Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP), LA “Faktor teknologi juga, iya untuk teknologi kita selalu cari informasinya, teknologi apa yang bisa kita *adopt* dari luar atau apa yang bisa dikembangkan disini, atau bagusnya lagi kita menemukan sesuatu.” (wawancara tanggal 1 Agustus 2017).

Beberapa waktu sebelumnya telah dilaksanakan penerapan hormon pada buah belimbing sebagaimana dikutip Kabid Ketahanan Pangan dan Hortikultura (KPH) DKP3 Kota Depok, HK, “...ini mau ada pelatihan mengenai katanya ada

hormon pertumbuhan yang diterapkan pada buah mangga tapi bisa dicoba untuk belimbing. Itu dari BPTP Lembang.” (wawancara tanggal 4 April 2017).

Perkembangan ilmu dan teknologi juga dapat diterapkan dalam proses perencanaan dan pembangunan yang menurut pandangan Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN, bahwa,

“... teknologi pun hanya sebagai *tools*, hanya untuk mempercepat proses pelayanan, meningkatkan profesionalitas kita, jadi meskipun teknologi itu tidak ada, pekerjaan kita tetap selesai, tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu. Kita sendiri sudah ada teknologi intranet dan sudah terpapar hampir ke seluruh kelurahan.” (wawancara tanggal 4 Agustus 2017)

Singkatnya ilmu dan teknologi telah menjadi bagian penting dalam pembangunan. Yang dibutuhkan saat ini adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi manusia dan lingkungannya. Perkembangan teknologi ini ke depan tentunya harus mempermudah proses perencanaan dan budidaya pertanian di lahan terbatas.

5.1.2.5 Faktor Pendanaan

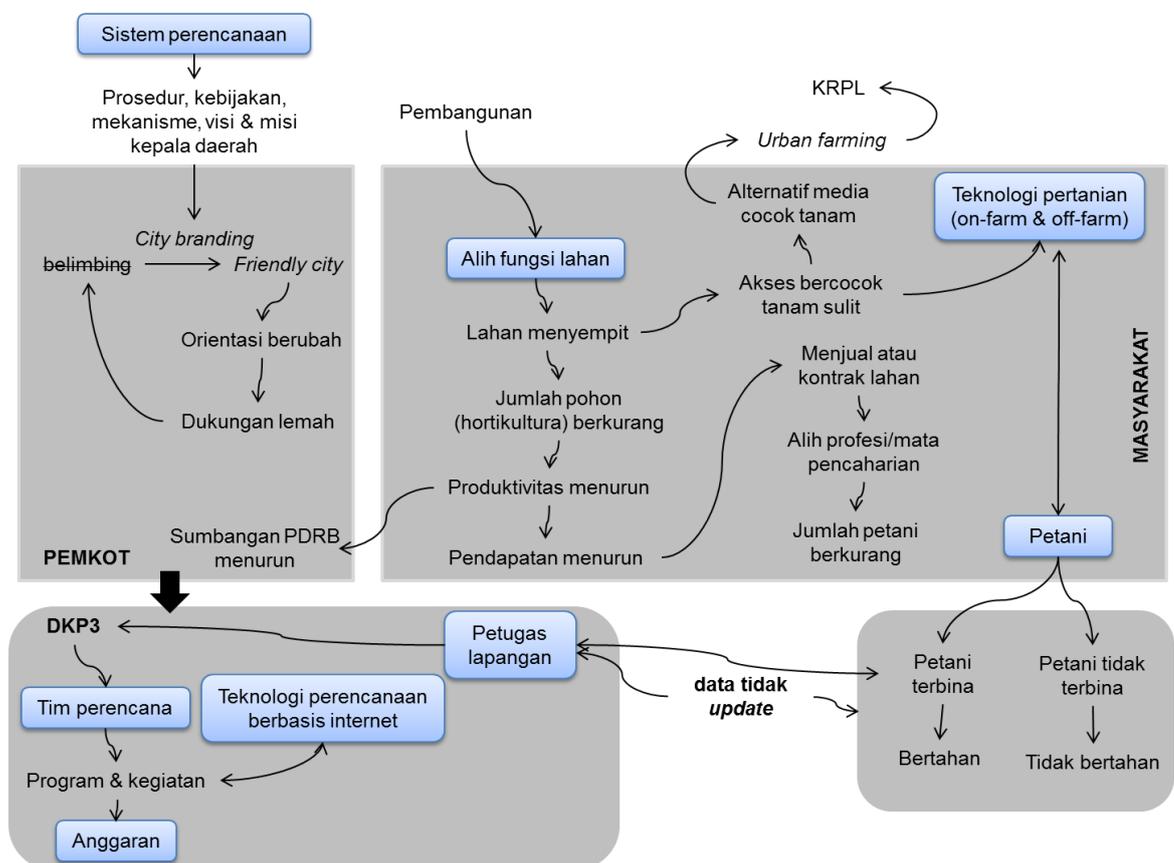
Faktor pendanaan menjadi hal klasik dan bersifat *given*, terlebih lagi digunakan dalam perencanaan pembangunan. Diharapkan dengan adanya perencanaan yang baik diharapkan tidak terjadi pemborosan atau kebocoran. Kasi Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) DKP3 Kota Depok, HAF mengatakan “Faktor anggaran juga turut mempengaruhi perencanaan.” (wawancara tanggal 3 Agustus 2017).

Senada dengan pernyataan tersebut, Kasubbag Umum, Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan (UPEP), LA, mengutarakan:

“Faktor pendanaan ada juga pengaruhnya, ada pasti lebih diprioritaskan pelayanan umum seperti apa gitu kan. Pasti pimpinan punya kebijakan dan lebih luas pandangannya ya. Lebih luas yang harus dilayani. Anggaran ini untuk prioritas ini dulu. Bukan berarti tidak diperhatikan tapi karena

keterbatasan anggaran untuk pelayanan publik lebih diprioritaskan.” (wawancara tanggal 1 Agustus 2017)

Namun hal sebaliknya dilontarkan oleh Kabid Program Pembangunan Bappeda Kota Depok, RSN, bahwa “Faktor anggaran seharusnya tidak menjadi masalah tergantung kita dalam menentukan skala prioritas.” (wawancara tanggal 4 Agustus 2017). Dengan demikian faktor anggaran yang mendukung perencanaan adalah anggaran yang tersedia dalam jumlah signifikan dan digunakan sesuai skala prioritas pembangunan.



Sumber: Hasil Analisis, 2017

Gambar 5.5 Interaksi antara faktor-faktor pendukung dan penghambat perencanaan

5.2 Pembahasan

5.2.1 Penyusunan Rencana Pembangunan Pertanian Hortikultura Berbasis Sumberdaya Lokal

5.2.1.1 Penyiapan rancangan rencana pembangunan

Penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan, yang dirumuskan sebagai arah dan pedoman dalam melaksanakan pembangunan pertanian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai amanat yang tertuang dalam UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menyusun sendiri rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Rencana tersebut dituangkan dalam peraturan daerah dalam bentuk RPJMD, lalu masing-masing OPD membuat rencana strategis dan rencana kerja sesuai dengan RPJMD. Hal ini sesuai dengan pendapat Soekartawi (1990:4) bahwa perencanaan pembangunan sebagai proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu dengan melibatkan kebijaksanaan (*policy*) dari pembuat keputusan berdasarkan sumberdaya yang tersedia dan disusun secara sistematis.

DKP3 Kota Depok mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan. Secara normatif penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal mengikuti mekanisme perencanaan pembangunan daerah yang mengacu pada UU No.25 Tahun 2004 tentang SPPN dan Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal di Kota Depok dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu:

1. Pendekatan politik

Penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal didasarkan atas penjabaran visi dan misi kepala daerah terpilih, yakni Walikota Depok. Visi dan misi tersebut dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) yang selanjutnya akan dijabarkan secara tahunan dalam bentuk dokumen perencanaan jangka pendek (RKPD) termasuk di dalamnya tujuan pembangunan daerah. Artinya perumusan tujuan merupakan dimensi dari proses politik (Conyers dan Hills, 1994:76). Kebijakan dan strategi pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal dipengaruhi dengan visi dan misi tersebut. Hal ini sesuai pendapat Rustiadi dkk. (2011:336) bahwa visi adalah “hal yang ingin dicapai”, sedangkan misi adalah “cara untuk mencapai”.

Hal yang ingin dicapai oleh kepala daerah terpilih yaitu membuat sebuah kota metropolitan lebih bersahabat dengan *tagline* yang berbunyi *friendly city*. Sedangkan cara untuk mencapainya adalah dengan membuat program prioritas yaitu kota ramah anak, kota tanpa sampah dan kota sehat. Sebenarnya penggantian ikon bagi sebuah kota tidak menjadi masalah sepanjang dapat memberi edukasi dan manfaat kepada masyarakatnya. *Tagline* yang berbunyi *friendly city* terasa lebih *familiar* bagi semua kalangan daripada *mem-branding* belimbing yang bagi masyarakat metropolitan terasa janggal. Apatah lagi keberadaan buah belimbing yang saat ini makin tergerus oleh pembangunan

terutama alih fungsi lahan. Sebagaimana pendapat Tjokrowinoto (1987:3) dan diperkuat oleh penelitian Pham dan Smith (2014:335) bahwa pengaruh warna politik turut menentukan perencanaan pembangunan sebuah daerah terutama di negara-negara berkembang. Alhasil terpilihnya kepala daerah baru juga otomatis akan membawa program sesuai dengan visi dan misi yang diusungnya. Dan ini berdampak pada perencanaan pembangunan pertanian daerah setempat (Hapsari, 2014:5).

2. Pendekatan teknokratik

Pendekatan teknokratik dilakukan DKP3 Kota Depok untuk menyusun rencana kerja awal sebagai bahan dalam forum koordinasi. Pendekatan ini menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah, dimana dalam hal ini DKP3 Kota Depok mengadakan *sharing* pendapat dan usulan kegiatan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan pertanian di periode selanjutnya. Pendekatan secara teknokratik menandakan bahwa dalam penyusunan rencana pembangunan DKP3 Kota Depok berupaya memberikan yang terbaik berdasarkan skala prioritas kota sehingga hasil dari perencanaannya dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat luas terutama para petani.

3. Pendekatan partisipatif

Pendekatan partisipatif dilakukan pemerintah Kota Depok dengan cara melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang diselenggarakan melalui proses musrenbang dan Forum Renja OPD. Para pemangku kepentingan tersebut dianggap mewakili unsur-unsur yang ada di dalam masyarakat dan diharapkan dapat menyampaikan usulan pembangunan di wilayahnya.

Perwakilan unsur-unsur yang ada di masyarakat ini merupakan orang-orang yang dianggap mengetahui secara mendalam permasalahan pembangunan yang terjadi di wilayahnya. Adanya pendekatan partisipatif akan memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pendapat dan usulan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas yang ada di wilayahnya. Selain itu masyarakat merasakan efek pembangunan yang telah berjalan sehingga mengetahui apa kelebihan dan kekurangan yang mesti diperbaiki dalam perencanaan pembangunan selanjutnya, atau dengan kata lain masyarakat dapat memberikan umpan balik kepada pemerintah selaku pengelola kebijakan.

Pendekatan partisipatif menandakan keterlibatan masyarakat langsung dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Sehingga kebutuhan *real* masyarakat diharapkan dapat diwujudkan dari hasil pendekatan ini meskipun tidak semuanya terpenuhi dalam satu waktu atau periode mengingat adanya skala prioritas pembangunan. Adanya partisipasi masyarakat dalam perencanaan turut menentukan keberhasilan pembangunan daerah setempat (Dezellan dkk., 2014:568).

4. Pendekatan *top-down* dan *bottom-up*

Pendekatan *top-down* merupakan penyampaian kebijakan pembangunan dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah hingga sampai kepada masyarakat, sedangkan pendekatan *bottom-up* merupakan penjangkauan aspirasi masyarakat untuk diteruskan ke tingkat pengelola kebijakan di atasnya dalam struktur pemerintahan yakni mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga kota. Pendekatan *top-down* dilakukan oleh pemerintah pusat ke daerah dalam bentuk keputusan-keputusan terkait perencanaan (Conyers dan Hills, 1994:225).

Kegiatan musrenbang dan renja OPD merupakan perpaduan dari pendekatan *top-down*, *bottom-up* dan partisipatif karena di dalamnya memuat penyampaian kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat yang mencakup pemangku kepentingan dari seluruh unsur masyarakat sekaligus penjangkauan aspirasi masyarakat untuk diambil dan diteruskan ke pemerintah. Musrenbang dan renja OPD dilakukan setiap tahun dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengajukan usulan, masukan, ide dan saran kepada pemerintah agar pembangunan selanjutnya dapat lebih baik dari periode sebelumnya. Seluruh usulan, masukan, ide dan saran tersebut tetap mempertimbangkan tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Secara umum keterlibatan petani dalam tahapan musrenbang sudah cukup aktif mengingat dari segi jumlah personel tidak terlalu banyak dan umumnya terkonsentrasi pada satu komoditas unggulan yaitu belimbing. Keberadaan petani dalam proses musrenbang dan renja OPD menunjukkan tingkat partisipasi petani cukup tinggi untuk turut merumuskan perencanaan pembangunan pertanian ke depan dan masih adanya kepedulian pemerintah terhadap sumberdaya lokal.

Pendekatan *top-down* dan *bottom-up* memberikan batasan usulan pembangunan dengan memperhatikan tujuan, sasaran, arah dan kebijakan pembangunan yang telah ditetapkan sehingga usulan yang diajukan dapat lebih fokus pada hal-hal tersebut. Oleh karena itu pemerintah Kota Depok terlebih dahulu melakukan sosialisasi perencanaan pembangunan tahun berjalan kepada masyarakat sehingga masyarakat memahami tujuan, sasaran, arah dan kebijakan pembangunan yang akan dijalankan. Dengan begitu tidak akan terjadi pengulangan usulan perencanaan yang sudah dilakukan sebelumnya. Hal ini

didukung pendapat Robbins dan Coulter (2012:205) yang menyatakan bahwa perencanaan berfungsi untuk memberi arahan yang jelas, mengurangi ketidakpastian, mengurangi pemborosan dan kejenuhan, dan menetapkan tujuan. Ditinjau dari aspek administrasi publik, hal demikian menandakan bahwa perencanaan pembangunan daerah ditujukan bagi kepentingan publik (Indradi, 2016:102; Thoha, 2010:91).

Dalam rangka menghadapi tantangan pertanian di masa depan maka DKP3 Kota Depok menyusun rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal secara simultan dan berkesinambungan melalui tahapan-tahapan yang telah ditetapkan. Tahapan yang berkesinambungan inilah yang disebut oleh Conyers dan Hills (1994:3) sebagai perencanaan.

Dokumen perencanaan, RPJMD dan Renstra OPD sebagai rujukan (dengan tetap memperhatikan Renstra Kementerian) dalam penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal mengandung kesiapan pemerintah dalam mengadopsi perencanaan ke depan yang dalam teori perencanaan Conyers dan Hills (1994:74) dikenal dengan istilah *decision to adopt planning*. RPJMD dan Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sebagai penjabaran visi dan misi kepala daerah. Artinya disini, seluruh program dan kegiatan yang ada dalam RPJMD dan Renstra dijabarkan secara detail di dokumen perencanaan yang lebih rendah hirarkinya yakni RKPD dan Renja OPD. Oleh karena itu apa yang disebut oleh Conyers dan Hills (1994) sebagai *specify planning goals* dan *formulate objectives* sudah tertuang disini. Dengan demikian, organisasi dalam hal ini DKP3 telah berada dalam kondisi *establish* untuk menyusun perencanaan atau *establish organizational framework for planning*.

Adanya kegiatan sosialisasi perencanaan pembangunan tahun berjalan yang diselenggarakan Pemerintah Kota Depok merupakan langkah bijak pemerintah dalam upaya mendekatkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai kepada masyarakat sekaligus melihat sejauhmana respon yang diberikan oleh masyarakat terhadap pembangunan yang telah berjalan. Hal ini didukung pendapat Tjokroamidjojo (1995b:57) bahwa dalam tahap perencanaan perlu diadakan tinjauan keadaan sekaligus memperkuat kondisi *establish organizational framework*. Kegiatan sosialisasi ini berguna untuk menampilkan program dan kegiatan yang akan dijalankan selama tahun berjalan sehingga masyarakat memahami darimana harus memulai dan bagaimana caranya untuk melanjutkan, baik untuk diperbaiki ataupun dihentikan.

Setelah kegiatan sosialisasi tadi, kemudian pemerintah daerah melakukan FGD isu strategis yang dilaksanakan di tingkat kota untuk menentukan isu-isu strategis yang kemungkinan berkembang di tahun berikutnya. FGD ini merupakan perencanaan teknokratik karena melibatkan pakar dan *stakeholders* serta dengan menggunakan metode ilmiah. Peneliti menganggap kegiatan ini lebih dari sekedar melontarkan isu semata namun juga bersifat *beyond planning* sehingga ada lompatan-lompatan jauh ke depan dalam melihat situasi yang akan datang. Dalam teorinya, Tjokroamidjojo (1995b:57) menulis sebagai kegiatan “perkiraan keadaan masa yang akan dilalui”. Isu mengenai alih fungsi lahan dianggap bukan isu strategis karena sampai saat ini tidak pernah ada yang melontarkan hal tersebut. Bisa jadi menurut peneliti, istilah “alih fungsi lahan” adalah kegiatan yang wajar dan tidak mengandung konsekuensi berbahaya sepanjang dilakukan secara benar, legal dan formal. Namun, lain halnya bila “alih fungsi lahan” ini dibungkus dengan istilah yang lebih dikenal sebagai “konservasi

lahan” atau “ruang terbuka hijau”. Oleh karena itu ruang terbuka hijau (RTH) terus digalakkan oleh Pemerintah Kota Depok untuk memenuhi kuota 30% sebagaimana Perda Kota Depok No.01 tahun 2015 tentang RTRW.

Terkait dengan RTH tersebut DKP3 Kota Depok juga tengah memperkenalkan konsep KRPL, Kawasan Rumah Pangan Lestari sebagai wujud ketahanan pangan berbasis sumberdaya lokal, yaitu program dari Kementerian Pertanian. Secara harfiah, konsep KRPL tidak jauh berbeda dengan pertanian perkotaan hanya saja belum dilakukan secara massif. Padahal berdasarkan penjelasan dokumentasi dari Kementerian Pertanian, konsep “kawasan” digunakan bila diterapkan dalam skala luas, yaitu mencakup desa atau kampung atau wilayah yang memungkinkan untuk menerapkan prinsip RPL.

KRPL sejauh peneliti ketahui baru dilakukan oleh sekelompok ibu-ibu PKK berupa pemanfaatan lahan pekarangan rumah. Mereka menanam beragam jenis tanaman berupa sayuran dan buah. Penggalakan kegiatan KRPL menandakan pendekatan *top-down* dari pemerintah pusat lebih mewarnai program dan kegiatan yang dijalankan oleh pemerintah daerah yang notabene memiliki sumberdaya lokal tersendiri untuk dijadikan program unggulan. Hal ini pun menunjukkan perencanaan di tingkat pusat cenderung lebih baik dibandingkan di daerah karena kegiatan tersebut bersifat *measurable, available, useable, sensitive* dan *cost-effective* sebagaimana pendapat Pham dan Smith (2014:328-329). Sedangkan konsep agrowisata yang sedang di “gadang” oleh DKP3 Kota Depok belum mengandung indikator-indikator di atas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dukungan pemerintah pusat turut menentukan keberhasilan perencanaan pembangunan daerah (Hapsari, 2014:5).

Adapun konsultasi publik yang diselenggarakan setelah FGD isu strategis menandakan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam melihat peluang dan tantangan ke depan sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Dalam hal ini pemerintah daerah telah bersinergi dengan masyarakat agar upaya perencanaan pembangunan daerah dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

5.2.1.2 Pelaksanaan musrenbang

Setelah melalui tahapan sosialisasi dan FGD isu strategis tadi, penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal dilakukan melalui mekanisme penyelenggaraan musrenbang sesuai urutan yang telah ditetapkan oleh Bappeda yaitu mulai di tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, lalu tingkat kota. Di beberapa tempat ada yang diawali dengan musyawarah di tingkat RT dan RW sebagai bagian dari pengumpulan data yang akan dibawa ke musrenbang tingkat kelurahan. Selanjutnya usulan di tingkat kelurahan akan dibawa ke tingkat kecamatan. Setelah itu hasil-hasil musrenbang tersebut diinventarisir guna dibahas di tingkat kota. Diantara musrenbang tingkat kecamatan dan musrenbang tingkat kota ada mekanisme partisipatif yang diselenggarakan oleh tiap-tiap OPD untuk menjaring aspirasi dari para *stakeholders* yang dinamakan Forum Renja OPD. Forum Renja OPD bertujuan untuk menyusun rencana kerja OPD dimana usulan dari musrenbang dan usulan dari kebutuhan prioritas internal OPD akan dimasukkan ke dalam dokumen perencanaan RKPD dan Renja OPD. Penyelenggaraan kegiatan musrenbang dilakukan setiap awal tahun yakni mulai Januari hingga bulan Maret. Adanya jangka waktu yang diberikan oleh Bappeda untuk setiap proses musrenbang dimaksudkan agar perencanaan dapat dihasilkan dan pembangunan dapat segera dijalankan oleh pemerintah sehingga masyarakat pun dapat menikmati

hasil pembangunan tersebut. Menurut Tjokroamidjojo (1995b:57) jangka waktu pencapaian tujuan merupakan hal pokok dalam menyusun perencanaan pembangunan. Bahkan Conyers dan Hills (1994:7) dan Kartasasmita (1997:49) memasukkan waktu atau periode sebagai unsur penting dalam perencanaan.

Musrenbang tingkat kelurahan diselenggarakan oleh kelurahan dan dikoordinasikan oleh kecamatan. Usulan perencanaan pembangunan di musrenbang kelurahan berasal dari masyarakat tingkat RT dan RW. Selanjutnya usulan tersebut akan diurut berdasarkan prioritas pembangunan. Sedangkan musrenbang tingkat kecamatan diselenggarakan oleh kecamatan dan dikoordinasikan oleh Bappeda. Usulan rencana dari tingkat kelurahan akan dibahas lalu dikelompokkan berdasarkan prioritas pembangunan. Musrenbang tingkat kecamatan ini dihadiri oleh unsur kelurahan, anggota DPRD, tokoh masyarakat, dan Bappeda. Keterlibatan petani dalam musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan hingga tingkat kota sudah terlihat aktif meskipun ada kendala komunikasi antara kelompok tani dengan pemerintah dan pihak musrenbang. Kendala komunikasi ini disebabkan masing-masing pihak belum membuka diri secara lebih luas, dimana pihak petani merasa sebagai pihak yang harus dibantu, dan dipihak pemerintah merasa sebagai pihak yang telah banyak membantu. Upaya pengawalan usulan pertanian di musrenbang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota telah ditempuh oleh DKP3 Kota Depok dengan cara hadir di kegiatan musrenbang bersama dengan PPL. Menurut peneliti, jaranganya usulan terkait pertanian disebabkan beberapa hal yaitu kurangnya edukasi terhadap petani mengenai masalah pertanian saat ini yang mengarah ke konsep pertanian perkotaan; kedua, permasalahan perkotaan yang cenderung berkembang menyebabkan persoalan pertanian

tereduksi sedikit demi sedikit sehingga terkesan dikesampingkan; dan ketiga, selama ini petani hanya mengandalkan “ingatan” dalam memberikan data dan informasi kepada petugas maupun khalayak sehingga usulan yang dimunculkan terkesan tidak berbobot dan lemah untuk di”eksekusi”.

Adapun forum renja OPD merupakan tahapan perencanaan yang diselenggarakan oleh DKP3 Kota Depok sebagai perwujudan pendekatan partisipatif. Selain untuk menyelaraskan usulan yang digulirkan dari musrenbang sebelumnya, forum renja OPD juga menampung aspirasi dari delegasi yang diundang yaitu unsur teknis OPD, Bappeda, kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, dan kelompok tani wanita. Sedangkan musrenbang tingkat kota merupakan proses akhir dari perencanaan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah kota dan dihadiri segenap unsur masyarakat dan pemerintahan mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota. Seluruh usulan perencanaan diprioritaskan dan dimatangkan untuk menjadi perencanaan pembangunan kota, dan selanjutnya diturunkan berdasarkan masing-masing sektor atau OPD termasuk perencanaan pembangunan pertanian.

Kepesertaan yang diikutsertakan dalam proses musrenbang mencakup seluruh *stakeholders* yang dianggap mewakili unsur-unsur yang ada di masyarakat seperti perwakilan pemuda, orangtua, tokoh masyarakat, dan profesi. Perwakilan dari unsur masyarakat ini dilakukan karena tidak mungkin menghadirkan seluruh masyarakat dalam satu forum terbatas. Selain itu perwakilan ini dimaksudkan untuk memenuhi unsur dalam proses perencanaan. Pelibatan petani dalam proses musrenbang cukup baik dilihat dari keinginan mereka untuk menonjolkan sektor pertanian diantara sektor-sektor lain.

Tahapan kegiatan musrenbang dan Forum Renja OPD merupakan kegiatan pengumpulan data dari masyarakat. Pengumpulan data dimaksudkan untuk mengetahui permasalahan dan kondisi eksisting pertanian. Pengumpulan data juga sebagai dasar pertimbangan dan evaluasi terhadap pembangunan yang telah dilakukan. Permasalahan dan kondisi eksisting pertanian diperoleh melalui potensi wilayah dan gambaran umum Kota Depok. Data tersebut berasal dari lapangan yang dikumpulkan oleh mantri tani dan PPL, atau berasal dari proposal yang diajukan oleh kelompok tani, pokok-pokok pikiran anggota dewan dan hasil evaluasi program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya. Seluruh data tersebut dikumpulkan sebagai dasar perencanaan, lalu diolah dan dianalisis oleh DKP3 Kota Depok sehingga permasalahan yang ada dapat terlihat lebih jelas.

Dengan demikian dilihat dari kondisi di atas dapat diinterpretasikan bahwa pengumpulan data merupakan tahapan terpenting dalam penyusunan rencana pembangunan (Blakely, 1989 dalam Kuncoro, 2012:53). Conyers dan Hills (1994:74) justru menempatkan kegiatan pengumpulan data setelah perumusan tujuan, sedangkan penelitian ini, kegiatan pengumpulan data dilakukan setelah penentuan isu strategis dan sebelum penetapan rencana. Dengan data yang akurat, valid dan kekinian, tentunya turut menentukan kualitas perencanaan yang dirumuskan. Semakin bagus datanya maka semakin bagus pula perencanaan yang dihasilkan. Semakin bagus perencanaan maka diharapkan semakin bagus pula implementasinya.

Data yang tidak akurat disebabkan tidak dilakukan pembaruan data sehingga data dinilai tidak *real*. Penyuluh dan petani seolah-olah saling menunggu dalam memberikan data dan informasi dimana pihak petani tidak

memiliki catatan aktivitas kesehariannya dan dipihak penyuluh kurang aktif untuk menggali lebih dalam aktivitas yang dilakukan oleh petani. Artinya secara administratif, terjadi kendala dalam pengumpulan data di lapangan selama ini. Dalam ruang administrasi publik, peran yang dibangun merupakan sinergi antara keaktifan masyarakat dengan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah (Hardiyansyah, 2011:3). Sehingga masyarakat dapat menikmati manfaat dari pembangunan dan pemerintah berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi terbatas, pernyataan responden mengenai rumitnya permasalahan pertanian selama ini adalah komunikasi antara petani dengan pemerintah. Sehingga apa yang dipahami oleh pemerintah dengan apa yang dipahami oleh petani tidak saling terkait satu sama lain. Oleh karena itu ada kesadaran dari petani untuk menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan agar terjadi titik temu dalam membahas persoalan pertanian. Usulan petani untuk rembug bersama antara petani, penyuluh, POPT, Dinas, dan pedagang pengepul, perlu diapresiasi sebagai jalan tengah dalam memajukan pertanian yang berbasis sumberdaya lokal.

Selain pengumpulan data dari lapangan, hasil evaluasi program dan kegiatan pada periode sebelumnya juga menjadi pertimbangan untuk dijadikan dasar perencanaan selanjutnya. Capaian program atau kegiatan beserta kendala yang dihadapi sebelumnya menjadi masukan untuk memperbaiki atau sebagai pertimbangan untuk mendorong sebuah program atau kegiatan.

Selain itu aspirasi juga disalurkan melalui proposal yang diajukan oleh petani ke DKP3 Kota Depok. Selama pembuatan proposal mereka didampingi oleh para penyuluh mengingat keterbatasan kemampuan petani dalam bidang

administrasi. Data yang telah terkumpul kemudian diverifikasi dan diidentifikasi, lalu dikelompokkan berdasarkan prioritas. Setelah itu diolah dan dianalisis untuk menjadi usulan program atau kegiatan dalam perencanaan. Pengelompokan usulan prioritas mempertimbangkan pula anggaran yang tersedia.

5.2.1.3 Penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan

Rancangan akhir rencana pembangunan dilakukan setelah seluruh data dan informasi yang didapatkan melalui kegiatan musrenbang diinventarisir. Kemudian hasil inventarisir tersebut dipilih dan dipilah berdasarkan skala prioritas kota dan isu strategis tahun berikutnya yang diusulkan melalui kegiatan FGD. Seluruh OPD termasuk DKP3 Kota Depok mengolah apa saja yang menjadi prioritas sesuai target dan sasaran RPJMD dan Renstra. Rancangan akhir ini berupa draf rencana pembangunan yang akan ditetapkan sebagai dokumen perencanaan pembangunan.

Prioritas DKP3 Kota Depok saat ini adalah kegiatan KRPL sebagai kegiatan turunan dari Pemerintah Pusat, namun dalam pelaksanaannya masih terkendala konsep dan sumberdaya manusianya. Berdasarkan hasil wawancara dan diskusi terbatas, pernyataan responden mengarah kepada agrowisata belimbing, yang juga lagi-lagi terbentur konsep dan infrastruktur. Sehingga baik kegiatan KRPL maupun agrowisata masih terbentur di tahap konsep. Alhasil keduanya belum menunjukkan hasil yang signifikan.

Pemunculan *city branding* pun masih terlihat samar bagi kalangan petani. Di satu sisi, secara politis, membuka kran seluas-luasnya bagi pengembangan pertanian khususnya sumberdaya lokal mengingat Kota Depok sebagai kota yang memiliki keunggulan komparatif sumberdaya lokal berupa belimbing Dewa;

di sisi lain belum nampak koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dengan petani, dalam hal ini pengawalan isu-isu pertanian dalam musrenbang.

5.2.1.4 Penetapan rencana

Penetapan rencana pembangunan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ditetapkan oleh kepala daerah dalam bentuk Peraturan Walikota. Dalam UU No.25 Tahun 2004 tentang SPPN, tahap penetapan rencana diurut secara terpisah dari tahapan penyusunan rencana. Artinya proses penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal dimulai dari pelaksanaan FGD isu strategis dan konsultasi publik, pelaksanaan musrenbang hingga penyusunan draf rencana pembangunan. Hal ini menandakan bahwa proses penyusunan rencana harus sedemikian jelas dan terang sehingga menghasilkan suatu perencanaan yang berkualitas. Perencanaan yang berkualitas akan mampu menghasilkan pembangunan yang juga berkualitas, yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat dan meminimalisir dampak negatif pembangunan. Adapun kegiatan sosialisasi perencanaan pembangunan tahun berjalan sebagai upaya penjelasan dan tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat terhadap program dan kegiatan yang akan dijalankan di tahun tersebut. Sehingga dengan adanya upaya itu keberlanjutan perencanaan dapat tercapai dengan mempertimbangkan dimensi ekonomi, sosial dan lingkungan (Munasinghe, 2004:1; Suryana, 2005:45; Saptana dan Ashari, 2007:127) serta aspek yang dapat mendukung dimensi tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, sejauh ini penyusunan rencana pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal ditentukan mulai dari pengumpulan data di tingkat paling dasar yaitu musrenbang tingkat kelurahan. Partisipasi petani untuk mengusulkan permasalahan pertanian dapat dimulai di

tingkat ini. Pengawasan isu-isu pertanian oleh DKP3 Kota Depok menentukan berlanjut tidaknya perencanaan pembangunan pertanian yang secara khusus berbasis sumberdaya lokal. Dukungan pemerintah terhadap pengembangan sumberdaya lokal masih terbatas pada kemampuan petani untuk bertahan dari alih fungsi lahan. Oleh karena itu persoalan sumberdaya lokal harus ditangani bersama antara petani dan pemerintah daerah, dan tidak berat sebelah (Tjokrowinoto, 1987:3).

5.1.1 Faktor-faktor yang Mendukung dan yang Menghambat Perencanaan Pembangunan Pertanian Hortikultura Berbasis Sumberdaya Lokal

Perencanaan pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal didukung oleh beberapa faktor sebagaimana telah diuraikan pada subbab sebelumnya yaitu faktor lingkungan, faktor sumberdaya manusia, faktor sistem perencanaan, faktor perkembangan ilmu dan teknologi dan faktor pendanaan (Riyadi dan Bratakusumah, 2004:16-39). Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat perencanaan ini maka akan memudahkan para perencana bersama pengelola kebijakan untuk mengantisipasi hal-hal yang dapat menyebabkan perencanaan menjadi tidak berkualitas.

Perencanaan yang tidak berkualitas akan menyebabkan roda pembangunan berdampak negatif baik kepada masyarakat maupun ke pengelola kebijakan itu sendiri. Meskipun faktor-faktor yang mendukung dan yang menghambat perencanaan ini dapat diidentifikasi dengan baik adakalanya kemampuan perencana dan pengelola kebijakan untuk mengubahnya dari situasi yang kurang menguntungkan kepada situasi yang menguntungkan juga sangat ditentukan oleh pengalaman dalam pemerintahan. Hanya saja hal ini dapat

menjadi jebakan bagi para perencana dan pengelola kebijakan sehingga mereka sekedar menjalankan rutinitas belaka dibandingkan melakukan analisis data yang lebih akurat sebagaimana pendapat Conyers dan Hills (1994:199).

5.1.1.1 Faktor Lingkungan

Tak dipungkiri, faktor lingkungan baik eksternal maupun internal turut mendukung ataupun menghambat sebuah perencanaan. Pembangunan sebagai hasil dari proses perencanaan bagai “pisau bermata dua” dimana pembangunan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, pengentasan kemiskinan dan perbaikan lingkungan, namun di sisi lain dampak dari pembangunan itu sendiri dapat pula mengakibatkan ketidakseimbangan ekologis, meningkatnya kejahatan, dan jumlah pengangguran atau dengan kata lain menciptakan ketidakadilan sosial. Todaro dan Smith (2011:18) berpandangan seharusnya pembangunan sebagai suatu proses multidimensional, bukan mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi lantas terjadi ketimpangan pendapatan serta kemiskinan. Bahkan Tjokrowinoto (2012:8-9) justru mengkhawatirkan pembangunan dengan target setinggi-tingginya pertumbuhan ekonomi akan membawa dampak buruk kerusakan lingkungan dan sosial. Wheeler (2013:1) bahkan telah memprediksi permasalahan akibat pembangunan tersebut.

Dengan kata lain pembangunan sebagai wujud dari perencanaan perlu dibenahi. Perencanaan itu sendiri merupakan ruang lingkup administrasi publik. Pembenahan terhadap administrasi publik terasa lebih mendesak ketimbang pembangunan itu sendiri sebab di dalam administrasi publik terdapat perencanaan yang akan mengarahkan jalannya pembangunan dan tujuan yang akan dicapai. Pembenahan juga dilakukan terhadap aktor dari administrasi publik tersebut yaitu perencana yang akan dibahas pada faktor sumberdaya manusia.

Artinya untuk saat ini dampak pembangunan berupa alih fungsi lahan yang menyebabkan tergusurnya sumberdaya lokal menjadi faktor yang menghambat perencanaan pembangunan pertanian.

Kota Depok sebagai daerah penyangga ibukota negara mengalami pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi. Pertumbuhan jumlah penduduk berupa tingkat kelahiran dan tingkat urbanisasi. Jumlah penduduk yang terus bertambah tentunya akan berpengaruh pada kebutuhan tempat tinggal. Kebutuhan tempat tinggal juga akan berpengaruh terhadap perubahan lahan yang semula diperuntukkan sebagai kawasan pertanian atau ruang terbuka hijau menjadi kawasan pemukiman, perkantoran dan industri. Alih fungsi lahan yang semakin massif menyebabkan akses untuk bercocok tanam juga semakin sulit (Pham dan Smith, 2014:331). Menurunnya produktivitas belimbing Dewa setiap tahun tidak terlepas dari menyempitnya lahan yang tersedia, dan sebagaimana pendapat Pham dan Smith (2014:332) bahwa dalam jangka panjang produktivitas suatu komoditas di lahan terbatas akan semakin menurun. Dampaknya ke depan bagi petani adalah sulitnya meningkatkan pendapatan bila hanya mengandalkan komoditas di lahan yang terbatas.

Perubahan kawasan pertanian menjadi kawasan pemukiman dapat berpengaruh terhadap petani yang menginginkan penghidupan yang dianggap lebih layak dengan beralih profesi dari petani menjadi pekerja selain bertani. Hal inilah yang mendasari konsep perencanaan berkelanjutan oleh Wheeler (2000:133) agar pembangunan dapat menyelamatkan lingkungan dan menciptakan keadilan sosial.

Selain pengaruh psikologis petani, juga tidak terjadi regenerasi di dalam keluarga petani dimana anak-anak petani tidak melanjutkan profesi orangtuanya

menjadi petani. Sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu yang perlu dikhawatirkan, mengingat dimanapun orangtua akan menginginkan anaknya lebih baik dari diri mereka. Pengalaman peneliti, anak-anak petani senantiasa mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan orangtuanya. Disadari atau tidak, sebenarnya hal tersebut dapat menjadi aset sewaktu-waktu anak mereka dapat membantu kebutuhan orangtuanya melalui pendidikan yang mereka raih. Tergantung bagaimana orientasi yang terbentuk dalam benak anak-anak mereka.

5.1.1.2 Faktor Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia perencana di lingkungan pemerintah kota terutama DKP3 Kota Depok dapat mendukung ataupun menghambat perencanaan pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal. Kualitas perencanaan yang baik tergantung dari kualitas perencanaannya. Kondisi saat ini DKP3 Kota Depok belum memiliki sumberdaya manusia perencana. DKP3 Kota Depok hanya memiliki aparatur fungsional penyuluh yang berjumlah 17 orang dimana satu orang penyuluh ditempatkan di satu kecamatan. Dengan jumlah tenaga penyuluh yang dimiliki Kota Depok saat ini dipandang sudah memadai untuk seluruh sentra pertanian yang ada.

Sumberdaya manusia perencana mencakup aparatur fungsional perencana dan aparatur struktural (non perencana). Aparatur struktural yang terlibat dalam perumusan perencanaan sangat memungkinkan karena keterbatasan jumlah aparatur fungsional perencana. Hal tersebut bisa terjadi karena menurut Fainstein dan DeFilippis (2016:1-2) seorang *planner* tidak hanya membuat perencanaan dan *non-planner* dapat juga membuat perencanaan. Untuk meningkatkan kualitas perencanaan maka diperlukan adanya sumberdaya

manusia perencana yang berkualitas pula. Sekalipun ada pelatihan atau bimbingan teknis terkait perencanaan untuk tim perencana dari seluruh OPD di lingkup pemerintahan Kota Depok, namun ke depannya harus disiapkan pula sumberdaya manusia perencana berdasarkan kompetensinya. Secara internal sejauh ini kekurangan sumberdaya perencana diimbangi dengan keberadaan tim perencanaan dari masing-masing OPD yaitu kepala dinas, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala seksi, kepala UPT (bila ada), kasubbag UPEP, kasubbag keuangan, kepala BPP (khusus di DKP3) dan staf kasubbag UPEP. Dengan tim yang “gemuk” ini diharapkan koordinasi dalam perencanaan menjadi lebih mudah dan bersinergi untuk mencapai tujuan, serta konsolidasi berjalan baik. Ini pun sudah cukup sebagai modal sumberdaya manusia perencana dalam menyusun sebuah perencanaan yang baik mengingat sejauh ini keberadaan tim perencana memainkan peran yang signifikan.

Keberadaan petani, apalagi yang tereduksi juga memegang peranan penting dalam mendukung perencanaan pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal. Petani yang tereduksi selalu aktif dalam kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh para petugas lapangan. Menurut Daft (2010:14) keberadaan organisasi akan mampu menciptakan inovasi bagi anggotanya. Oleh karena itu kelompok tani berperan penting untuk memunculkan inovasi-inovasi terbaru dalam aktivitasnya. Dengan memperhatikan hasil wawancara dan diskusi terbatas, sumberdaya petani yang dimiliki Kota Depok semakin menurun jumlahnya. Penurunan ini disebabkan petani yang beralih profesi. Beralihnya profesi itu disebabkan mereka menjual lahannya ke orang lain atau dikontrakkan, maupun tergusur oleh pembangunan yang dijalankan pemerintah. Meskipun menurun jumlahnya, secara kelembagaan dan kemandirian petani sudah cukup

berkembang baik. Antusias petani juga ditunjukkan dengan kehadiran mereka dalam kegiatan musrenbang. Mereka inilah yang menjadi informan dalam setiap persoalan pertanian untuk penyusunan rencana pembangunan pertanian.

Peran para petugas lapangan sebagai jembatan komunikasi antara DKP3 Kota Depok dengan para petani juga terasa sangat penting. Bilamana peran penyuluh kurang aktif maka akan berpengaruh terhadap pemberdayaan petani dan kurangnya informasi yang diterima oleh DKP3 Kota Depok dari petani. Petani berharap peran petugas di kegiatan musrenbang dapat menyokong informasi yang diberikan oleh petani di forum tersebut. Apalagi tidak semua petani dapat berkesempatan hadir di musrenbang. Dengan adanya petugas diharapkan usulan mengenai persoalan pertanian terasa lebih kuat dibandingkan hanya disuarakan oleh petani. Selain itu kehadiran petugas di musrenbang sebagai pengawalan usulan pertanian untuk disampaikan ke forum selanjutnya.

Pihak DKP3 Kota Depok sampai saat ini belum memberikan *reward and punishment* yang dapat memotivasi mereka untuk bekerja optimal. Selama ini data mengenai petani belum dilakukan pembaruan sama sekali. Padahal dengan data tersebut dapat memberikan informasi penting mengenai persoalan pertanian. Adanya data yang senantiasa *update* maka informasi yang tersampaikan tentu akan lebih terpercaya daripada data yang kadaluarsa.

5.1.1.3 Faktor Sistem Perencanaan

Perencanaan pembangunan pertanian di Kota Depok mengacu kepada peraturan mengenai perencanaan pembangunan daerah dan pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan adanya aspek hukum yang digunakan dalam perencanaan pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal. Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2004:30) yang dimaksud dengan sistem

perencanaan adalah aturan atau kebijakan yang digunakan oleh daerah tertentu sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang dapat menyangkut prosedur, mekanisme pelaksanaan, pengambilan keputusan, dan pengesahan.

Arahan dan kebijakan pimpinan berperan penting dalam perencanaan sebagaimana yang diungkapkan Fadlina (2013:322) bahwa keterlibatan pimpinan atau *top-management* mempengaruhi perencanaan. Demikian pula yang disampaikan oleh Robbins dan Coulter (2012:211) bahwa faktor yang turut mendorong perencanaan adalah level kepemimpinan dalam organisasi.

Termasuk dalam arahan dan kebijakan disini adalah visi dan misi kepala daerah terpilih. Kepala daerah terpilih memiliki janji-janji politik semasa kampanye dan harus direalisasikan saat mereka terpilih. Visi kepala daerah terpilih yang cukup menyentak adalah penggantian ikon belimbing menjadi *friendly city*. Alhasil, apa yang menjadi orientasi kepala daerah dengan visi barunya akan menentukan seperti apa perencanaan ke depan. Belimbing Dewa yang notabene memiliki keunggulan komparatif, perlu perhatian yang serius berupa peran aktif pemerintah dalam melindungi keberadaan sumberdaya lokal tersebut. Minimal, dalam kebijakan pembangunan ke depan ada sebuah regulasi berupa peraturan daerah atau peraturan walikota yang melindungi keberadaan komoditas tersebut.

Oleh karena itu pergantian kepemimpinan memungkinkan pergantian pula prioritas program yang telah dijalankan oleh kepala daerah periode sebelumnya. Sistem politik yang dianut secara demokrasi di Indonesia saat ini memungkinkan setiap kepala daerah terpilih untuk menuangkan dan menjabarkan visi dan misinya dalam dokumen perencanaan jangka menengah daerah (Tjokrowinoto,

1987:3; Pham dan Smith, 2014:335). Laju urbanisasi yang tinggi, alih fungsi lahan yang menggerus sumberdaya lokal, kebutuhan terhadap air dan udara, dan keseimbangan ekologi membutuhkan perencanaan agar laju pembangunan tidak memakan korban lebih besar. Sikap yang perlu dibangun dengan adanya pergantian kepemimpinan adalah konsistensi dan komitmen bersama. Dengan konsistensi dan komitmen bersama meskipun ada pergantian kepemimpinan maka apapun visi dan misinya akan tetap mendukung program yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5.1.1.4 Faktor Perkembangan Ilmu dan Teknologi

Faktor berikutnya yang perlu mendapat perhatian adalah perkembangan ilmu dan teknologi. Upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dapat dibantu dengan adanya perangkat teknologi yang memudahkan setiap orang untuk mengaksesnya. Saat ini proses perencanaan di Kota Depok dapat dilakukan dengan menggunakan RKPD *online*. Ditambah lagi teknologi intranet sudah terpapar ke hampir seluruh kelurahan di Kota Depok. Kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian juga akan terasa lebih optimal dengan pemanfaatan ilmu dan teknologi terutama yang berbasis ramah lingkungan. Dalam pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal di Kota Depok, kegiatan-kegiatan yang memanfaatkan perkembangan ilmu dan teknologi yaitu penggunaan hormon pertumbuhan pada tanaman belimbing, aplikasi pengendalian hama dan penyakit tanaman. Singkatnya, teknologi baru dan terbarukan dibutuhkan untuk mendongkrak kualitas perencanaan pembangunan daerah sehingga hasilnya dapat dinikmati secara lebih mudah dan terjangkau. Sehingga sekalipun teknologi hanya bersifat *tools* namun keberadaannya turut mendukung perencanaan pembangunan.

Penggunaan teknologi baru dan terbarukan sudah semestinya dilakukan oleh setiap daerah yang ingin memperbaiki kualitas pelayanannya. Tak dipungkiri keberadaan teknologi sangat membantu aparatur pemerintahan terutama di daerah. Begitupun yang dikatakan oleh Daft (2010:14) bahwa teknologi dapat memperbaiki tingkat pelayanan, bahkan menurut Pham dan Smith (2014:324) teknologi dapat membantu keberlanjutan perencanaan dan pembangunan. Sedangkan menurut Mosher (1987:79) dukungan teknologi sebagai syarat mutlak untuk pembangunan pertanian.

5.1.1.5 **Faktor Pendanaan**

Adanya keterbatasan anggaran untuk kegiatan pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal menyebabkan tidak semua usulan dapat dilaksanakan dalam satu waktu, atau disesuaikan dengan prioritas dan tahapan pembangunan. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan anggaran untuk perencanaan pembangunan pertanian hortikultura berbasis sumberdaya lokal ditunjukkan oleh kondisi penyusunan Renja DKP3 Kota Depok yang mengacu pada kegiatan dan plafon (pagu dana) serta berpedoman standar harga yang ditetapkan pemerintah kota. Kegiatan pembangunan di lingkungan DKP3 Kota Depok bersifat berkesinambungan karena berdasarkan evaluasi pembangunan pada periode sebelumnya perlu dilanjutkan. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan keterbatasan dalam anggaran. Namun keterbatasan ini sesuatu yang dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Maka selayaknya program dan kegiatan yang dijalankan harus tepat sasaran, tepat anggaran dan tepat waktu. Tepat sasaran artinya tidak menyimpang dari sasaran yang ditetapkan, tepat anggaran artinya sesuai dengan peruntukannya, dan tepat waktu artinya dilaksanakan

pada waktu yang dibutuhkan. Intinya anggaran yang ada saat ini cukup mendukung untuk perencanaan ke depan.

Faktor anggaran juga dapat digunakan secara politis oleh pemerintah pusat terhadap daerah yang kurang berhasil atau dianggap gagal dalam menjalankan agenda politik dari pemerintah pusat. Penggunaan anggaran secara bijak dapat menghindarkan aparatur pemerintahan dari tindak korupsi. Agar terhindar dari tindak korupsi perlu pengawasan dari pihak *independent* sehingga hasil program dan kegiatan dapat akuntabel. Dengan adanya korupsi maka perencanaan yang dijalankan akan berkurang kualitasnya, atau dapat terhenti sama sekali bila terjadi pergantian kekuasaan akibat hukuman yang dijalani.